TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575
e-mail : redaksi@sinar
www.sinartani.c

ber 2025
08
un LVI



8 HET Pupuk Subsidi Turun

10 'Keracunan' Anggur, Mengubah Hidup Aat Jamiat



1 TAHUN KABINET MERAH PUTIH



EDITORIAL

Mengingat Kembali **Pidato Perdana Prabowo**

Tanggal 20 Oktober 2025, Pemerintahan Presiden Prabowo berumur 1 tahun. Berbagai hiruk pikuk dunia perpolitikan meramaikan selama perjalanan Kabinet Merah Putih. Tak terkecuali di sektor pertanian. Tabloid Sinar Tani mencatat, banyak kebijakan baru dikeluarkan Presiden dalam setahun ini, khususnya yang terkait dengan pertanian dan pangan.

Membuka kembali catatan pidato Prabowo saat pelantikan Presiden di Gedung DPR/MPR setahun lalu. Dalam pidato kenegaraan pertamanya, setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian Prabowo yakni masalah kemiskinan rakyat dan ketahanan pangan dan energi.

Saat itu Prabowo mengatakan, hingga kini masih melihat masyarakat yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Banyak rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi dan tidak mempunyai pakaian untuk berangkat sekolah.

”Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik? Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus?” tambah Prabowo.

Sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), saat itu Prabowo juga mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Paling lambat 4-5 tahun Indonesia akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.

Bangsa Indonesia katanya, tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. “Tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Kini setahun sudah Prabowo memimpin bangsa Indonesia. Soal kemiskinan, ternyata masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Meski hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau turun 0,20 juta orang terhadap September 2024 dan lebih rendah 1,37 juta orang terhadap Maret 2024.

Sementara untuk mengungkit produksi pangan, khususnya padi, Presiden Prabowo menerbitkan beberapa regulasi. Pertama, Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Kedua, Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemelihaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Ketiga, Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Dengan keluarnya Inpres tersebut penyuluh pertanian di daerah akan menjadi pegawai pusat.

Setahun Pemerintahan Prabowo, produksi beras menurut BPS periode Januari–Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31.338.197 ton. Capaian lainnya, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang terlihat dari stok beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton (Juni 2025).

Dengan produksi beras tersebut, pemerintah menyakini swasembada akan bisa tercapai dalam setahun ke depan. Di tengah tantangan yang tidak kecil, peningkatan produksi pangan, bukanlah matematika 1 ditambah 1 menjadi 2. Banyak faktor x yang bisa berpengaruh terhadap upaya pemerintah menjaga produksi pangan. Salah satunya persoalan iklim yang semakin tak terduga dan masifnya konversi lahan.

MENTAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Kabar Gembira **untuk Petani**

Pada hari ini kami sampaikan ada dua hal penting. Pertama, kinerja Kementerian Pertanian satu tahun. Kedua adalah berita baik untuk seluruh petani Indonesia dan belum pernah terjadi selama kita Merdeka.

Pertama, capaian Kementerian Pertanian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibrang atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya. Kedua, PDB kita, penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Selain itu, sepanjang sejarah NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi.

Faktor yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah kering panen (GKP) dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.500/kg. Alhamdulillah, petani menikmati harga itu dan juga serapan Bulok tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton. Jumlah tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Ekspor pertanian naik 42,19% dibanding 2024. Kem udian, tenaga kerja naik jumlahnya di sektor pertanian.

Kemudian, beberapa capaian lainnya selama satu tahun adalah produksi beras hingga Okotber mencapai 33,19 juta ton. Padahal tahun lalu dalam satu tahun hanya sekitar 30 juta ton. Bahkan diperkirakan akhir tahun, produksi padi kita sesuai BPS akan mencapai 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam satu tahun. Mudah-mudahan swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan 4 tahun, jika tidak ada aral melintang, maka 1-2 bulan ke depan kita bisa capai.

Kesejahteraan petani juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian. Tapi, ini dari BPS, juga dirilis FAO dan Kementerian Amerika Serikat, United State Department of Agriculture yang dirilis pada April 2025 lalu, bahwa Indonesia produksinya akan melompat.

Kemudian kami melakukan revitalisasi sektor pupuk. Jika dulu harus 12 menteri yang menyetujui alokasi pupuk untuk petani, kemudian, gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia juga harus tanda tangan. Ada sebanyak 145 regulasi mengenai pupuk yang mengikat.

Atas instruksi Presiden, melalui regulasi yang dikeluarkan, pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, kemudian bisa langsung dari pabrik ke petani. Jadi rantai distribusinya kita pangkas. Dulu petani selalu berteriak kelangkaan pupuk. Pemerintah kemudian menambah alokasi pupuk menjadi 9,55 juta ton.

Kemudian pelaku pemalasuan pupuk, kami temukan ada 27 perusahaan. Dari jumlah itu, ada 5 perusahaan 100% pupuknya palsu. Kemudian selebihnya adalah kandungannya hanya 70% dari standar. Ini kita serahkan le penegak hukum. Terbaru, kami mencabut 2.039 kios pengecer pupuk subsidi ijinnya kami cabut. Jadi penting untuk seluruh distributor dan pengecer, jangan coba-coba menaikkan harga pupuk subsidi yang telah pemerintah tetapkan. Kalau adanya yang menaikkan, izinnya kita akan dicabut. Secara menyeluruh sistemnya kita kawal.

Kabar gembira untuk petani. Atas arahan Bapak Presiden, mulai Rabu (22/10), harga pupuk subsidi turun 20 persen. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Tolong seluruh yang hadir pada hari ini PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Jika ada yang naikkan harga pupuk, maka izinnya akan dicabut dan diproses hukum. Kami pastikan kedepan, Insya Allah produksi akan naik lebih tinggi, NTP dan kesejahteraan petani naik. Jika biaya produksi tani turun, maka otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya.

SAUNG TANI



Mentan ancam cabut ijin kios pupuk yang nakal
- Ayo jangan nakal-nakal

Pemerintah turunkan HET pupuk subsidi
- Kabar gembira buat petani

Ombusdman : tata kelola sawit rawan maladministrasi
- Banyak yang bermain ya...

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik.com (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Jeruk Keprok, Segar Lagi Berkat Penyuluh



Setelah sempat meredup akibat serangan penyakit dan tanaman tua, jeruk keprok kini kembali bergairah. Peran penyuluh pertanian jadi kunci dalam peremajaan kebun dan peningkatan mutu buah nasional.

Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman jeruk di Asia Tenggara. Dari sekian banyak varietas yang tumbuh di nusantara, jeruk keprok menjadi ikon utama karena rasa manis segarnya dan adaptasinya yang luas di berbagai daerah. Di balik potensi besar itu, geliat jeruk keprok nasional sempat menurun akibat serangan penyakit, lemahnya regenerasi kebun, dan ketidakseimbangan pasar.

Data Direktorat Jenderal Hortikultura menunjukkan, produksi jeruk nasional tahun 2024 mencapai sekitar 2,4 juta ton, dengan jeruk keprok berkontribusi sekitar 40 persen. Angka itu sebenarnya cukup tinggi, tetapi produktivitas rata-rata masih berada di kisaran 18–20 ton/ha, padahal potensi hasil varietas unggul seperti Keprok Batu 55 atau Keprok Garut bisa menembus 30 ton/ha jika menerapkan budidaya intensif.

Kesenjangan produktivitas ini sebagian besar karena umur tanaman yang menua, penggunaan bibit asalan, serta kurangnya penerapan teknologi modern. Di beberapa daerah sentra seperti Banyuwangi, Karo, Malang, Enrekang, dan Tanggamus, sebagian besar tanaman sudah berusia di atas 15 tahun dan mulai menunjukkan penurunan kualitas buah.

Masalah terbesar bukan di kemampuan petani, tapi di regenerasi kebun dan pengetahuan teknologi. Banyak petani masih memegang cara lama yang tidak lagi efisien.

Ancaman Penyakit CVPD

Hampir semua penyuluh di daerah jeruk pasti akrab dengan istilah CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration). Di lapangan, CVPD menjadi momok utama yang menurunkan produktivitas jeruk keprok hingga 40 persen. Di beberapa kebun rakyat, petani sering kali baru sadar setelah sebagian besar pohonnya terlanjur rusak.

Upaya pengendalian telah dilakukan dengan pendekatan terpadu, antara lain melalui pemangkasan pohon terinfeksi, sanitasi kebun secara berkala, penggunaan bibit bebas penyakit, serta penanaman rootstock tahan CVPD seperti JC (Japanese Citron) atau JSR (Japanese Sour Rootstock).

Namun penyuluh di lapangan mengakui, penerapan langkah-langkah ini belum merata. Banyak petani masih enggan menebang pohon sakit karena menganggapnya "masih bisa berbuah". Di sinilah pentingnya pendekatan edukatif dan persuasif dari penyuluh. Padahal seharusnya petani melihat kebunnya sebagai investasi jangka panjang. Kalau dibiarkan, penyakit itu menular pelan-pelan ke seluruh blok. Butuh contoh nyata di lapangan agar mereka percaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inovasi mulai diperkenalkan untuk memperbaiki produktivitas jeruk keprok. Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Jeruk dan Tanaman Subtropika (BRMP Jestro) yang dahulu dikenal sebagai Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) di Batu, Jawa Timur, mendorong penerapan teknologi grafting cepat (sambung pucuk) untuk mempercepat peremajaan.

Dengan teknik ini, tanaman bisa berbuah dalam waktu 2–3 tahun, jauh lebih singkat dibanding 5 tahun jika ditanam dari bibit konvensional. Selain itu, penyuluh juga mulai mengenalkan sistem irigasi tetes (drip irrigation) untuk efisiensi air, terutama di wilayah dataran tinggi yang kering. Teknologi ini memudahkan pengaturan nutrisi larutan pupuk melalui sistem fertigasi, sehingga unsur hara bisa langsung terserap akar tanaman.

Sementara itu, dalam pengendalian hama, pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) berbasis musuh alami seperti *Tamarixia radiata* mulai diterapkan untuk mengontrol populasi kutu loncat. Petani di Banyuwangi bahkan sudah mampu memelihara koloni serangga predator ini secara mandiri dengan pendampingan penyuluh.

Salah satu strategi efektif penyuluh mendorong adopsi teknologi baru melalui demonstration plot. Demplot bukan sekadar lahan contoh, tapi ruang pembelajaran langsung bagi petani untuk membandingkan hasil antara teknologi baru dan cara konvensional.

Di Malang, penyuluh setempat membangun demplot jeruk keprok yang menggunakan bibit unggul Batu 55 dan sistem irigasi tetes. Dalam dua musim tanam, hasil panen meningkat 25 persen dan ukuran buah lebih seragam. Melihat hasil nyata, petani di sekitar lokasi mulai menanam bibit serupa secara mandiri.

Namun peningkatan produktivitas tanpa dukungan kelembagaan hanya menghasilkan panen tanpa arah pasar. Penyuluh kini didorong memperkuat kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) agar mampu berperan sebagai unit bisnis.

Beberapa daerah menunjukkan hasil nyata. Di Banyuwangi, Gapoktan Jeruk Keprok Mandiri berhasil mengelola 40 ha kebun jeruk dengan sistem kemitraan. Mereka memiliki rumah sortasi dan pengemasan sendiri, serta memasok buah ke pasar modern di Surabaya dan Jakarta. Sementara di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, koperasi tani jeruk menggandeng pelaku ekspor untuk memenuhi permintaan dari Malaysia.

Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini memperlihatkan penyuluhan partisipatif jauh lebih berhasil dibanding sekadar sosialisasi satu arah. Petani belajar dari pengalaman nyata, sementara penyuluh bisa menilai efektivitas teknologi di kondisi agroklimat lokal. Penyuluh juga menjadi jembatan antara petani, offtaker, dan lembaga keuangan.

Penyuluh membantu petani memahami aspek Good Agricultural Practices (GAP), Standard Operating Procedure (SOP) budidaya, dan pencatatan produksi. Dengan begitu, jeruk keprok tidak lagi dijual berdasarkan "asal panen", tapi sudah mulai mengarah pada standar mutu pasar modern.

Jeruk keprok adalah simbol kekuatan hortikultura nasional. komoditas yang menyatukan aspek teknologi, ekonomi, dan sosial. Untuk menguatkannya, dibutuhkan sinergi antara penelitian, penyuluhan, dan pelaku usaha. Selama penyuluh dan petani terus berjalan seirama, jeruk keprok akan tetap menjadi cerita manis dari tanah nusantara. Kini, melalui peran aktif penyuluh pertanian dan dukungan teknologi hortikultura, harapan untuk mengembalikan kejayaan jeruk lokal perlahan kembali menyala

Penulis : Rina Yuliati
Penyuluh Pertanian Pusat

Limbah Kopi dan Sampah Plastik, Solusi Atasi Perubahan iklim

CATATAN Begawan



Peneliti mengubah limbah kopi dan sampah plastik menjadi solusi mengatasi perubahan iklim. Para peneliti di Universitas Sharjah, UEA, telah mematenkan teknologi yang dirancang untuk menangkap karbon dioksida (CO_2) dari proses industri sebelum dilepaskan ke atmosfer.

Pendekatan ini memanfaatkan campuran ampas kopi (SCG), polietilen tereftalat (PET), plastik yang umum digunakan dalam kemasan, dan kalium hidroksida, bahan kimia alkali kuat. Bersama-sama, komponen-komponen ini membentuk material yang efektif untuk penyerapan CO_2.

Dengan memanfaatkan kembali ampas ini, metode baru ini tidak hanya menangkap CO_2 tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Inovasi tersebut berpusat pada produksi karbon aktif melalui ko-pirolisis ampas kopi dan limbah plastik polietilen tereftalat, menggunakan kalium hidroksida (KOH) sebagai agen pengaktif.

Para penemu melaporkan bahwa metode mereka menghasilkan karbon aktif dengan kapasitas penyerapan CO_2 yang tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi industri. Mereka juga menekankan rendahnya biaya produksi, berkat keterjangkauan dan ketersediaan bahan baku.

Penemuan ini merupakan contoh prinsip ekonomi sirkular dengan mengintegrasikan aliran limbah untuk peningkatan nilai dan daur ulang ganda menjadi produk bernilai. Setelah paten tersebut beralih ke penerapan industri, para peneliti yakin akan kemampuannya untuk menghilangkan kontaminan dan polutan dalam berbagai situasi, termasuk dalam berbagai proses pengolahan air.

Para penemu menyebutkan berbagai operasi industri yang dapat memperoleh manfaat dari penemuan mereka, seperti pemurnian gas, penyaringan air minum, pemulihan air tanah, pengolahan air umpan boiler dan servis, serta sistem pengolahan kolam renang, akuarium, air limbah, dan limbah. **Sumber :PHYS.ORG**

1 TAHUN KABINET MERAH PUTIH

Satu tahun Kabinet Merah Putih mendapat sorotan dari berbagai pihak. Berbagai lembaga survei dan kalangan pengamat mencoba mengukur tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden serta menteri-menteri. Bagaimana sektor pertanian?



Di tengah berbagai tantangan dalam pembangunan pertanian seperti perubahan iklim yang kian sulit diprediksi, konversi lahan yang semakin masif, dan tantangan lain, pemerintah mengatakan kondisi pangan cukup aman. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10).

Pertama, produksi beras tertinggi: produksi nasional Januari–Oktober 2025 mencapai 31.338.197 ton. Kedua, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Maksimal. Terlihat dari stok beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton (Juni 2025). Ketiga, Nilai Tukar Petani (NTP) Meningkat: NTP mencapai 124,36, tertinggi.

Keempat, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk pembelian Gabah Kering Panen naik. Pemerintah menetapkan harga beli gabah menjadi Rp6.500/kg. Kelima, deregulasi pupuk. Pemerintah menghapus 145 aturan tidak efisien, mempercepat distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.

Sementara itu lembaga survei seperti PT Indeks Politica Indonesia (PT IPI) menyebutkan, 80,2 persen masyarakat menyatakan cukup puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Sedangkan yang menyatakan kurang puas dan sangat tidak puas hanya 15,2 persen. Ada sekitar 4,6 persen tidak jawab/tidak tahu/rahasia.

Temuan ini menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo dalam satu pemerintahan ini. Salah satu aspek indikator kepuasan publik yang disurvei PT IPI yakni ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian sebagai landasan hidup masyarakat, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih stabil kedepan.

Menurut Suwadi Idris Amir Direktur IPI, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi penilaian teratas sebab figur nya dianggap serius memerangi mafia pangan. Selain itu, sektor pertanian berkontribusi cukup besar menggerakkan perekonomian masyarakat satu tahun ini.

Efek Domino HPP

Sementara itu, berdasarkan hasil riset Litbang Kompas, kebijakan menaikkan harga Gabah Kering Panen (GKP) menjadi salah satu langkah paling diapresiasi masyarakat sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Peningkatan harga gabah bukan hanya berpengaruh terhadap pendapatan petani, tapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pangan nasional yang lebih berkeadilan dan berpihak pada pelaku utama di sektor pertanian.

"Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil mensejahterakan petani. Tapi kalau kita pilah lagi respon berdasarkan pekerjaannya disitu ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris maka angkanya jauh lebih tinggi lagi yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut," ujar Peneliti Senior Litbang Kompas, Budiawan Sidik Arifianto dalam diskusi Kedai Kopi Sabtu (11/10).

Budiawan menjelaskan hasil survei ini mengacu pada wawancara langsung atau *face to face* kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai salah satu sentra padi terbesar nasional. Wawancara bahkan dilakukan kepada semua masyarakat sosial ekonomi baik bawah, menengah maupun atas.

"Kalau kita bicara pangan yang kita tanya ke responden ternyata secara umum 62 persen mereka mengikuti terus kalau kira tanya lagi terkait kepuasan program ketahanan pangan dibawah kementerian pertanian 71 persen mereka menyatakan puas," katanya. Jadi, hampir rata-rata masyarakat puas dengan apa yang dikerjakan pemerintah, khususnya di Kementerian Pertanian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan juga memberikan apresiasi atas capaian sektor pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kurun satu tahun terakhir, arah kebijakan pangan nasional yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menunjukkan hasil nyata di lapangan. "Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat. Masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya," ujar Yohan, Rabu (15/10).

Ia menilai kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga gabah, menjaga stabilitas pasokan beras, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga adalah wujud nyata keberpihakan kepada petani. "Capaian ini menjadi bukti bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani," tambah Yohan.

Karena itu, Yohan mendorong agar Kementan terus melanjutkan kebijakan pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani. Setidaknya ada tiga hal yang harus mendapat perhatian pemerintah yakni, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apresiasi FAO

Kinerja pertanian juga mendapat apresiasi dari *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). Indonesia masuk dalam daftar penerima rekognisi atas kontribusi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dunia.

Penghargaan diserahkan pada acara *Global Technical Recognition Ceremony* di Kantor Pusat FAO, Roma, Italia, Rabu (15/10), dalam rangka peringatan 80 tahun FAO. Indonesia menjadi salah satu dari 18 penerima rekognisi KSST pada dua kategori *Country-Level Recognition* dan *Institutional-Level Recognition*.

Pada kategori *Country-Level*, FAO mengapresiasi peran Indonesia dalam mendorong transformasi pertanian dan ketahanan pangan global melalui program KSST yang selaras dengan FAO *Strategic Framework* 2022–2031 dan visi "*Four Betters*" (*better production, better nutrition, better environment, better life*).

Satu harapan ke depan, bukan hanya subsektor pangan yang menunjukkan perbaikan, tapi juga pertanian secara umum, masih hortikultura, peternak dan pekebun. Semua itu menunggu uluran tangan pemerintah juga, khususnya petani.

Yul

Pangan Catatkan Sejarah



Satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih sektor pertanian menghasilkan beberapa capaian positif. Presiden Prabowo Subianto menilai keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah reformasi di sektor pangan. Reformasi tersebut tidak hanya mendorong kemandirian pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10), Presiden mengumumkan produksi pangan nasional sepanjang periode Januari–Oktober 2025 mencapai 31.038.190 ton, angka tertinggi produksi pangan dalam sejarah Indonesia. Selain mencatat rekor produksi tertinggi, cadangan beras pemerintah di Bulog juga mencapai 4,2 juta ton per Juni 2025, menjadi stok terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Tak hanya itu, dalam satu tahun Kabinet Merah Putih, Nilai Tukar Petani (NTP) melonjak hingga 124,36, tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. “Ini prestasi besar yang sangat membanggakan. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saya semula memberi waktu empat tahun untuk kembali swasembada, tapi tim pangan kita berhasil mencapainya hanya dalam satu tahun,” kata Prabowo.

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang diambil selama tahun ini. Diantaranya, menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp 5.500 menjadi Rp6.500/kg. Kemudian memperbaiki tata kelola pupuk subsidi dengan memangkas 145 regulasi lama yang menghambat distribusi, kemudian pupuk langsung dari pabrik ke petani, tanpa birokrasi berbelit.

Selain itu, kata Prabowo, pemerintah juga bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang memainkan harga dan menipu rakyat dengan menjual beras subsidi sebagai beras premium. “Praktik seperti ini tidak akan kita toleransi, dan akan kita tindak keras,” tegas Presiden.

Pemerintah juga mendorong pencetakan sawah baru juga menjadi prioritas. Hingga Oktober 2025, telah tercatat 225 ribu ha sawah baru, dan ditargetkan mencapai 480 ribu ha pada akhir 2026. Langkah ini diambil untuk menggantikan lahan pertanian produktif yang setiap tahun berkurang akibat alih fungsi lahan.

Tantangan Konversi Lahan

Prabowo mengakui, Indonesia menghadapi tantangan besar, hampir 100 ribu ha sawah hilang setiap tahun karena alih fungsi, lahan dibeli, dijadikan kawasan industri, perumahan, atau real estate. “Pabrik dan pembangunan memang kita butuhkan, tapi kalau lahan subur terus berkurang, dari mana kita akan mengamankan pangan? Karena itu, kita harus segera mencetak sawah baru,” katanya.

Intensifikasi lahan sawah eksisting juga terus dilakukan melalui program pompanisasi yang mendorong peningkatan produksi secara signifikan. Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti pentingnya infrastruktur pascapanen dalam menjaga ketahanan pangan. Pemerintah kini tengah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru Bulog agar distribusi dan penyimpanan beras semakin kuat dan efisien.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Bahkan, Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Amran menegaskan pentingnya menjadikan sektor pertanian sebagai poros utama kebangkitan ekonomi bangsa dan jalan menuju kedaulatan pangan nasional. Apalagi bahwa bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dunia di bidang pangan.

Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah telah mampu meningkatkan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat cadangan pangan nasional. “Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan, dalam kurun waktu singkat, berbagai target besar di bidang pertanian berhasil diwujudkan, termasuk swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa. “Tentu saja program yang sudah berjalan dan sudah baik akan terus dilanjutkan pada periode-periode berikutnya,” katanya.

Selain capaian di bidang pangan, berbagai program lain turut berjalan dengan hasil nyata. Diantaranya program UMKM, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, sekolah rakyat, sekolah unggulan, program makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan perbaikan irigasi yang dampaknya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

Khusus di sektor pertanian, pemerintah memastikan ketersediaan benih yang baik, pupuk yang cukup dan mudah diakses, serta irigasi yang berfungsi optimal. Perbaikan jaringan irigasi dilakukan di seluruh Indonesia agar air mengalir dari sumbernya langsung ke lahan pertanian, mengonversi setiap volume air menjadi hasil panen yang nyata.

Sudaryono menambahkan, pemerintah juga hadir langsung pada saat panen untuk memastikan harga yang diterima petani sesuai dan menguntungkan. Negara membeli hasil panen dengan harga yang layak agar kesejahteraan petani meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus naik mencapai 124.

Meski capaian besar telah diraih, Wamentan menekankan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. “Tentu saja masih banyak PR yang harus kita selesaikan, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita wujudkan dan kita perbaiki. Ada yang kurang, kita perbaiki,” katanya.

Keberhasilan mencapai swasembada pangan dalam satu tahun menunjukkan sektor pertanian kini menjadi fondasi utama ekonomi nasional. Dengan sistem yang lebih efisien, produktif, dan berkeadilan bagi petani, Indonesia membuktikan kemampuannya untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. **Yul**

Zulkifli Hasan: Fondasi Utama Kemandirian Pangan



Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan sektor pertanian menjadi fondasi utama kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Terlihat bukan hanya dari peningkatan produksi, tetapi juga dari hasil nyata berupa tercapainya swasembada beras dalam waktu singkat.

"Tahun lalu kita masih impor beras sekitar 4,5 juta ton. Sekarang, tahun 2025, nol. Tidak ada impor. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada," kata Zulhas, sapaan akrab Ketua Umum Partai PAN ini.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi solid lintas kementerian dan lembaga, yang disebutnya sebagai "superteam". Bahkan Zulhas memuji langkah cepat Kementerian Pertanian dalam menata kembali kebijakan pangan secara menyeluruh, mulai dari irigasi, perbaikan sistem pupuk, hingga penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang lebih menguntungkan petani.

"Sekarang tidak ada gabah yang dibeli di bawah HPP. Harganya naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Petani untung dan lebih sejahtera," ucap Zulhas. Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan terus memperkuat sektor pangan dengan membuka lahan sawah baru seluas 400 ribu ha pada tahun 2026 serta mempercepat riset benih unggul nasional.

"Kita perlu varietas baru, benih unggul baru. Vietnam bisa 10 ton/ha, kita masih 5–6 ton/ja. Ini tantangan kita ke depan. Presiden sudah menugaskan Kementerian Pertanian untuk memperkuat penelitian dan pengembangan benih," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor yang terbangun dalam pemerintahan saat ini merupakan kunci percepatan pembangunan pangan nasional. Capaian di sektor pangan dan pertanian bukan sekadar prestasi birokrasi, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari petani, nelayan, pedagang, akademisi, hingga media.

"Alhamdulillah, kita sudah di jalur yang benar. Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Dengan kerja keras, sinergi, dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia akan benar-benar berdaulat di bidang pangan," katanya. **Yul**

Sherly Tjoanda: Ada Perubahan Nyata



Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi capaian luar biasa sektor pertanian selama satu tahun terakhir. Kini pertanian Indonesia menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh petani dari Sabang sampai Merauke. "Dalam satu tahun, kita melihat bukti, bukan sekadar janji," ujarnya.

Perubahan tersebut, mulai dari peningkatan produksi nasional, stabilnya harga, hingga program yang benar-benar menyentuh petani di lapangan. Bahkan pertanian Indonesia mencatat sejarah dengan cadangan beras tertinggi sepanjang masa, produksi pangan meningkat, dan kesejahteraan petani mulai terasa dari desa ke desa.

Ia mengakui, perhatian Kementerian Pertanian juga dirasakan langsung di Maluku Utara melalui berbagai program bantuan, seperti pemberian bibit kelapa, pala, dan kakao. Program tersebut dinilai mampu mendorong produktivitas sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

"Di Maluku Utara, kami merasakan langsung perhatian pemerintah pusat. Hari ini kami datang untuk berdiskusi tentang pembangunan jalan tani guna mendukung program hilirisasi kelapa. Tujuannya jelas, kita tidak hanya bicara soal kedaulatan pangan, tetapi juga kesejahteraan petani," ujarnya.

Hilirisasi kelapa yang tengah dijalankan di Maluku Utara merupakan bagian dari visi besar mewujudkan pertanian yang bernilai tambah tinggi. Karena itu, Sherly menekankan, kolaborasi akan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementan. Dengan sinergitas berbagai pihak, program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal. **Yul**

Bustanul Arifin: 'Beyond' Swasembada Pangan

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Prof. Bustanul Arifin, menilai capaian Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025 merupakan tonggak bersejarah sekaligus bukti keberhasilan pemerintah dalam menata kebijakan pangan nasional secara menyeluruh. Capaian ini bukan sekadar swasembada, melainkan sudah 'beyond' swasembada pangan.

"Kalau melihat apa yang dilakukan pemerintah, saya kira sudah oke, tumbuh tinggi, tercapai swasembada. Saya katakan tadi 'beyond' swasembada," kata Prof. Bustanul. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi Januari–November 2025 mencapai 10,86 juta hektar (naik 12,08 persen) dengan produksi 57,60 juta ton GKG atau 33,19 juta ton beras, meningkat sekitar 4 juta ton dibanding tahun 2024.

President of the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) ini menjelaskan, produksi pertanian meningkat karena intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi didukung dengan penggunaan teknologi, teknik pemupukan berimbang, pertanian cerdas atau smart farming, dan lainnya.

"Tahun ini kita hasilkan produktivitas rata-rata sekitar 5,3 ton per hektar. Naik dibandingkan tahun 2025 sebesar 5,29 ton per hektar. Arahnya ke depan adalah pertanian presisi yaitu pertanian yang efisien dan peningkatan akan lebih tercapai," jelasnya.

Karena itu, Prof. Bustanul mengapresiasi langkah pemerintah termasuk Kementerian Pertanian. Selain peningkatan produksi, ia juga menyarankan pemerintah terus melakukan upaya stabilitas harga beras. "Langkah selanjutnya adalah stabilisasi harga beras di dalam negeri. Sehingga akses pangan pokok menjadi lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan," katanya. **Yul**



Suara Kampus:

Tantangan Besar Pertanian

Meski dalam setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pertumbuhan pertanian terbilang positif. Namun kalangan kampus mengingatkan beberapa catatan yang perlu pemerintah perhatikan, khususnya dalam mencapai kedaulatan pangan berkelanjutan.

Pertanian masih menghadapi tantangan besar ditengah perubahan iklim dan modernisasi yang kian cepat. Menurut Lektor Kepala Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Muhammad Makky, tiga hal menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional: stabilitas, produktivitas, dan nilai tambah bagi petani.

"Pertanian membutuhkan kestabilan, karena risikonya sangat tinggi. Ketika panen, adanya jaminan harga pembelian pemerintah yang memadai bisa memberi ketenangan dan motivasi bagi petani," ujar Makky.

Untuk itu menurutnya, stabilitas harga menjadi pondasi utama yang harus dijaga. Jika petani merasa aman dengan jaminan harga dan kepastian pasar, maka produktivitas akan meningkat. "Kita ingin setiap petak sawah menghasilkan panen yang tinggi. Semakin banyak hasil, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh," tambahnya.

Makky menyoroti masalah klasik di lapangan, proses penggilingan. Petani dengan lahan kecil kerap kesulitan menggiling gabahnya karena harus antre atau berbagi biaya dengan penggilingan keliling. "Kalau penggilingan besar, ampasnya masih bisa dimanfaatkan petani. Tapi kalau penggilingan keliling, sering kali terbuang begitu saja. Ini membuat nilai tambah petani menurun," ujarnya.

Di tengan tantangan perubahan iklim yang tidak menentu, Makky melihat pentingnya mekanisasi pertanian. "Air menjadi kata kunci perubahan iklim. Kadang saat butuh air justru kering, dan saat panen malah banjir. Jadi, mekanisasi dalam pengelolaan air sangat penting," katanya.

Selain itu, mekanisasi juga menjadi jawaban atas semakin menurunnya jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Saat ini petani semakin menua, sementara generasi muda enggan bekerja berat. Karenanya, modernisasi dengan alat dan sistem yang efisien menjadi sebuah keharusan.

Makky juga menyoroti pentingnya ketersediaan pupuk tepat waktu dan data pertanian yang terintegrasi. Ia berharap pupuk dapat disiapkan minimal 30 hari sebelum musim tanam agar petani lebih siap. Selain itu, pendataan penerima pupuk juga perlu divalidasi karena banyak petani yang sudah merantau, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. "Data tentang pupuk, alat mesin pertanian, hingga tempat jual-beli hasil panen harus terintegrasi," katanya.

Ia mengingatkan, kolaborasi antar-lembaga juga harus diperkuat. "Selama ini urusan alsintan ke penyuluh, pupuk ke koperasi, penggilingan ke pihak lain. Belum ada saluran komunikasi lintas sektor yang solid. Padahal kolaborasi ini penting," tegasnya. Ke depan, menurut Makky kebijakan pertanian ke depan harus berorientasi pada kemandirian pangan nasional dan perlindungan petani.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Lilik Soetiarso menyoroti tantangan ke depan tidak hanya terletak pada upaya mempertahankan swasembada, tetapi juga pada langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional 2045.

Untuk itu sangat penting melakukan upaya meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian. Misalnya, penguatan infrastruktur pangan, sistem distribusi yang efisien, serta ekosistem pertanian yang berkelanjutan perlu terus diperkuat secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Swasembada pangan ini adalah hasil kerja bersama yang perlu dijaga, namun target jangka panjang kita adalah kedaulatan pangan. Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara," ujarnya.

Lilik menyoroti salah satu program pertanian yang sangat dirasakan masyarakat yakni peluncuran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan hasil panen petani melalui bantuan pangan, yang terbukti mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan di lapangan.

PR Komoditas Pangan lain

Namun, di tengah optimisme pemerintah mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat, Ekonom dari Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati mengingatkan, capaian swasembada tersebut belum merata di semua komoditas. "Sebetulnya target swasembada itu apa? Yang sudah mencapai swasembada memang beras, walaupun masih ada impornya. Tapi yang belum dan masih problem, kedelai dan gula," ujarnya.

Nina mencontohkan, produksi kedelai nasional hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan data BPS, total kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun, sementara produksi lokal baru berkisar di angka 300 ribu ton. Artinya, hampir 90 persen pasokan masih bergantung pada impor, terutama dari Amerika Serikat dan Brasil.

Kebijakan pemerintah selama ini berfokus pada peningkatan produktivitas petani lokal melalui bantuan benih unggul, pupuk, dan insentif harga. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan tantangan yang lebih kompleks. "Produktivitas kedelai nasional masih rendah, sekitar 1,5 ton/ha, jauh di bawah produktivitas negara pemasok utama yang mencapai 3 ton/ha," katanya.

Harga juga menjadi persoalan. Kedelai impor seringkali lebih murah dibandingkan kedelai lokal, membuat petani enggan menanam. Tanpa kebijakan harga dasar yang menjamin keuntungan, sulit mendorong produksi dalam negeri tumbuh signifikan. Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah dan biaya logistik menambah tekanan pada harga bahan baku industri tempe dan tahu, dua produk pangan rakyat yang sangat sensitif terhadap perubahan harga kedelai.

Kondisi serupa terjadi pada komoditas gula. Produksi gula nasional pada 2024 tercatat sekitar 2,3 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri mencapai lebih dari 6 juta ton. Defisit yang besar ini otomatis ditutup dengan impor, baik dalam bentuk raw sugar untuk industri maupun gula konsumsi. Tanpa perbaikan kelembagaan dan efisiensi, swasembada gula masih akan menjadi mimpi panjang. **Gesh/ Herman/Yul**



HET Pupuk Subsidi Turun

Pemerintah secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Meski harga turun, pemerintah tidak lagi mengeluarkan tambahan anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Untuk Pupuk Urea dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg (turun Rp450/kg) atau dari Rp112.500/sak menjadi Rp90.000/sak (turun Rp22.500/sak). Kemudian, NPK dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg (turun Rp460/kg) atau dari Rp115.000/sak menjadi Rp92.000/sak (turun Rp23.000/sak). Sedangkan NPK kakao dari Rp3.300/kg menjadi Rp2.640/kg atau dari Rp165.000/sak menjadi Rp132.000/sak.

Sementara pupuk ZA dari Rp1.700/kg menjadi Rp1.360/kg (khusus tebu) atau dari Rp85.000 /sak menjadi Rp68.000/sak (khusus tebu). Adapun pupuk organik dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg atau dari Rp32.000/sak menjadi Rp25.600/sak.

"Ini sejarah, karena yang terjadi sebelumnya puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap dua tahun. Sekarang turun, karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Presiden Republik Indonesia," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat Apel Siaga 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian Presiden Prabowo dengan Penyuluh Pertanian di Jakarta, Rabu (22/10).

Amran menyampaikan, kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani. "Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk," katanya.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo, Amran mengatakan, pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Karena itu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret yakni merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN. "Dengan kebijakan ini akan langsung dirasakan lebih dari 155 juta penerima manfaat yang terdiri dari petani dan keluarganya di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kementerian Pertanian kata Amran, bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) bergerak cepat mengeksekusi perintah Presiden melalui pembenahan menyeluruh tata kelola pupuk bersubsidi. Mulai dari deregulasi distribusi langsung dari pabrik ke petani, penyederhanaan proses penyaluran, hingga pengetatan pengawasan dari hulu ke hilir.

"Kita merevitalisasi sektor pupuk karena pupuk adalah darah pertanian. Tanpa pupuk kita tidak bisa berproduksi. Ini langkah cepat pemerintah untuk menolong petani, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan tidak ada lagi kelangkaan pupuk di lapangan," lanjutnya.

Pemerintah juga melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh pihak manapun, termasuk korporasi besar yang menggunakan pupuk subsidi secara tidak sah. Bagi pelaku yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha serta proses hukum pidana sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga lima miliar rupiah.

Pemerintah juga membuka kontak pengaduan permasalahan pupuk subsidi. Ada dua nomor kontak yang pemerintah sediakan. Pertama, kontak pengaduan pupuk dengan nomor 0823 1110 9690. Kedua, hotline KPPP Pusat kontak pengaduan pupuk di nomor 0812 1533 5574.

"Saudaraku, sahabatku, kalau ada yang coba-coba menaikkan dari harga yang ditetapkan pemerintah, tolong dihubungi kontak pengaduan pupuk. Jadi hubungi ini kontak pengaduan pupuk itu pasti langsung ditindaklanjuti," kata Amran.

Kepada distributor dan pengecer pupuk subsidi di seluruh Indonesia, Mentan juga mengimbau untuk tidak menaikkan harga pupuk subsidi. Jika ada yang bermain-main lagi dengan harga pupuk subsidi, pemerintah akan mencabut ijinya. "Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian. Ini adalah kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama," tegasnya.

Hemat Anggaran

Sementara itu, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (22/10) mengatakan, dengan revitalisasi pabrik berpotensi menambahkan volume pupuk bersubsidi 700.000 ton secara bertahap sampai dengan 2029. Dari hasil revitalisasi dan efisiensi tata kelola pupuk bersubsidi, negara juga berpotensi menghemat Rp10 triliun.

Selain revitalisasi, Pupuk Indonesia juga berencana membangun 7 unit pabrik yang diharapkan akan selesai 5 unit paling lambat tahun 2029. Ketujuh pabrik baru nantinya berpotensi akan menurunkan biaya produksi 26%. Bahkan menambah potensi keuntungan PT Pupuk Indonesia hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026 dengan estimasi total keuntungan Rp7,5 triliun.

Pemerintah kata Rahmad, juga telah melakukan deregulasi atau menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi dari pabrik langsung ke petani. Sebagai tindak lanjut, Pupuk Indonesia juga akan melakukan pengawasan ketat pupuk bersubsidi dari pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi, sampai penjualan ke penerima di titik serah.

Bahkan pemerintah berkomitem menindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pengadaan, distribusi, dan penjualan pupuk bersubsidi seluruh Indonesia termasuk mafia dan koruptor. Bagi korporasi yang menggunakan pupuk bersubsidi akan dikenakan sanksi. Diantaranya, ancaman pencabutan izin, proses hukum pidana sesuai UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan (maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp 5 miliar).

Dalam tata kelola pupuk subsidi yang baru tersebut, Pupuk Indonesia akan melakukan perubahan pola pembayaran pupuk bersubsidi. Jika sebelumnya dibayarkan setelah penyaluran, ke depan menjadi sebagian dibayarkan di awal tahun agar dapat digunakan untuk belanja kebutuhan bahan baku.

Kebijakan ini bukan hanya soal harga pupuk, tetapi tentang keberpihakan negara kepada petani. Melalui langkah besar ini, pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional. **Ditjen PSP**



Satu Tahun Prabowo-Gibran, Ini Capaian Subsektor Peternakan

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum kebangkitan besar bagi subsektor peternakan nasional. Surplus produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor ke puluhan negara.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan dan kesehatan hewan, menunjukkan tren positif dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Dalam satu tahun terakhir, kita melihat hasil nyata dari kerja keras bersama. Kesejahteraan petani dan peternak meningkat, produksi tumbuh, dan ekspor menembus rekor baru," ujarnya.

Salah satu indikator keberhasilan yang paling mencolok adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 124,36%, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Pencapaian ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pertanian berjalan di jalur yang tepat.

Tidak hanya dari sisi kesejahteraan, kinerja ekspor juga mencatatkan rekor gemilang. Nilai ekspor produk pertanian Indonesia mencapai Rp507,78 triliun, atau naik 42,19% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menandai semakin kuatnya daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Selain itu, sektor pertanian berhasil menyerap 38,99 juta tenaga kerja, menjadikannya salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Tanah Air.

Kontribusi Terbesar

Dari seluruh subsektor yang ada, peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu kontributor terbesar. Tahun ini, subsektor tersebut menyumbang 15,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, dengan nilai Rp189,8 triliun atau tumbuh 2,78% dibanding tahun sebelumnya.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan PDB subsektor peternakan tercatat konsisten dan positif. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan struktur produksi, efisiensi usaha, dan penguatan rantai pasok di tingkat peternak rakyat.

Dari sisi perdagangan internasional, subsektor peternakan juga mencatat kinerja gemilang. Ekspor produk peternakan mencapai Rp15,46 triliun, meningkat 30% dari sisi volume dan 7,73% dari sisi nilai secara tahunan. Dengan capaian ini, subsektor peternakan menempati peringkat kedua tertinggi ekspor pertanian nasional, setelah subsektor perkebunan.

Komoditas andalan seperti sarang burung walet, madu, dan pakan ternak menjadi primadona ekspor yang menembus lebih dari 98 negara tujuan, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Selain itu, produk obat hewan turut berkontribusi besar dengan nilai ekspor mencapai Rp5,5 triliun ke lebih dari 95 negara. "Kita bahkan telah mengekspor ayam hidup ke Singapura. Ini menandakan bahwa produksi unggas nasional diakui dunia karena kualitasnya yang tinggi dan bebas dari penyakit," ungkap Agung.

Surplus produksi menjadi tanda kuatnya kemandirian subsektor peternakan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Indonesia mencatat surplus daging ayam sebesar 10,71% dan surplus telur sekitar 5%. Surplus tersebut tidak hanya diserap oleh pasar domestik, tetapi juga disalurkan untuk kebutuhan ekspor dan mendukung program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah.

"Kami berkomitmen untuk menjaga agar Indonesia tidak lagi mengimpor karkas maupun daging ayam. Produksi kita sudah lebih dari cukup, bahkan menopang jutaan lapangan kerja di sektor hulu," kata Agung.

Industri unggas di Indonesia melibatkan sekitar 4 juta peternak rakyat, sehingga keberlanjutan sektor ini memiliki dampak langsung terhadap perekonomian pedesaan. Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan pada komoditas sapi dan susu. Saat ini, impor daging sapi masih mencapai 52%, sedangkan impor susu mencapai 80% dari total kebutuhan nasional.

Karena itu, Kementerian Pertanian membuka lebar investasi besar-besaran untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi perah serta sapi potong dalam negeri. Sebab, fokus subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan adalah meningkatkan kapasitas produksi daging dan susu nasional agar ketergantungan impor dapat ditekan.

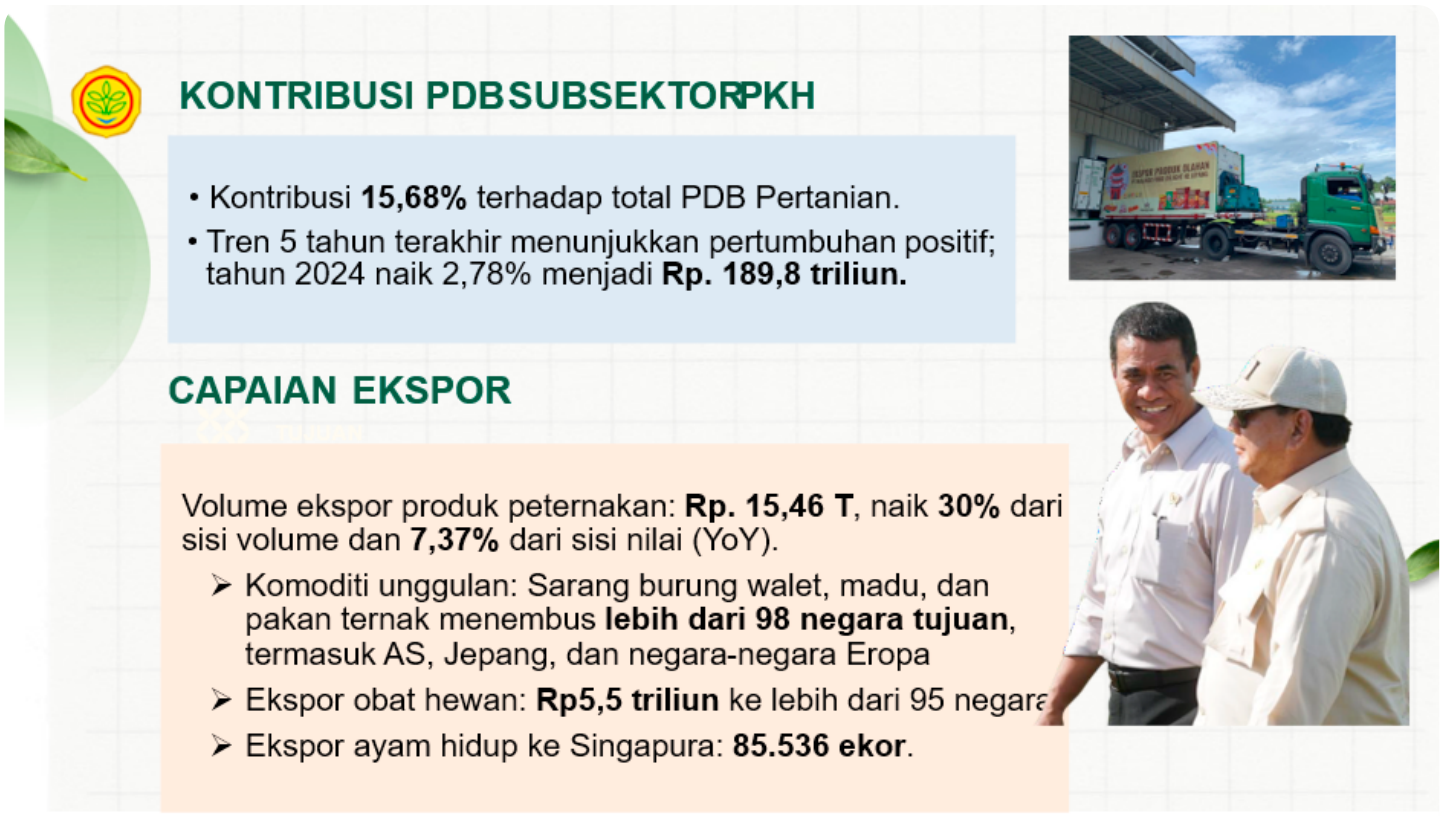
Bidang Kesehatan Hewan

Selain capaian ekonomi, pemerintah juga mencatat keberhasilan di bidang kesehatan hewan. Salah satunya adalah keberhasilan dalam pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sempat menjadi ancaman serius bagi sektor peternakan nasional.

Menurut Agung, penyebaran PMK berhasil ditekan secara signifikan, terutama di sembilan provinsi wilayah timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Tren penurunan juga terjadi pada penyakit lainnya, termasuk rabies, yang kini tengah difokuskan untuk dibasmi di Pulau Jawa serta sebagian wilayah Bali dan NTT.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan industri obat hewan. Kami memastikan ketersediaan vaksin dan obat hewan tetap terjamin di lapangan," tegasnya.

Setahun berjalan, sektor peternakan Indonesia menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian dan daya saing global. Dengan meningkatnya produksi, ekspor, dan kesejahteraan peternak, subsektor ini telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. "Peternakan bukan hanya tentang produksi daging dan telur, tetapi tentang masa depan kemandirian pangan bangsa," ujar Agung. **Herman/Yul**





‘Keracunan’ Anggur, Mengubah Hidup Aat Jamiat

Halaman rumah yang semula gersang kini menjelma menjadi kebun hijau dengan barisan tanaman anggur berbuah lebat. Itulah pemandangan di Kebun Anggur Ponjay, milik Aat Jamiat, sosok yang kini dikenal sebagai penggiat anggur sekaligus Ketua DPD Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia (ASPAI) Tangerang Selatan.

Berdiri sejak tahun 2019, Kebun Anggur Ponjay berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi wisata petik buah yang digemari masyarakat. Uniknya, semua berawal dari niat sederhana seorang wirausahawan yang ingin memanfaatkan halaman rumah.

Saat Tabloid Sinar Tani berkunjung ke lokasi Kebun Anggur Ponjay, di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Aat bercerita panjang lebar bagaimana dirinya terjun menjadi peng-Angguran. “Awalnya saya cuma ingin menanam sesuatu yang bisa menggantung di halaman, seperti labu atau pare. Lalu ada teman yang menyarankan menanam anggur. Dari situ saya mulai tertarik,” kenangnya sambil tersenyum.

Sebelum berkecimpung di dunia pertanian, Aat sebenarnya adalah seorang pelaku usaha di bidang valuta asing. Bahkan dirinya tak pernah berpikir menekuni dunia pertanian, apalagi mendalami anggur. Ia sama sekali tidak mengenal sebelumnya. Karena itu, Ia pun mulai belajar dari nol, hanya berbekal rasa penasaran dan semangat mencoba.

“Saya lihat referensi di YouTube karena sama sekali tidak punya pengalaman. Pelan-pelan saya belajar otodidak. Delapan bulan setelah menanam, tanaman anggur saya berbuah. Rasanya luar biasa. Dari situ saya mulai ketagihan, istilahnya sudah keracunan anggur,” ujarnya sambil tertawa.

Berawal dari hobi, usaha itu kini menjelma menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Aat terus bereksperimen dengan berbagai varietas anggur impor, mulai dari Transfiguration, Gos V, Akademik, Jupiter, Ninel, hingga Moondrop. Namun tak semua jenis anggur tersebut cocok tumbuh di iklim tropis.

Bukan Aat namanya kalau berhenti mencoba. Ia terus bereksperimen. Alhasil, dari berbagai percobaan, jenis anggur Transfiguration terbukti paling adaptif dan menghasilkan buah terbaik. Saat ini, Kebun Anggur Ponjay memiliki lebih dari 25 varian anggur dengan warna, rasa, dan tekstur yang beragam.

Meski begitu, Aat mengakui menanam anggur di iklim tropis bukan tanpa tantangan. Musim hujan menjadi masa paling sulit karena tanaman mudah terserang jamur dan hama. Karena itu, ia rutin melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida seminggu sekali sebagai langkah pencegahan.

”Jika tanaman sudah terlanjur terserang, penyemprotan dilakukan intensif tiga hari berturut-turut. Kalau sudah parah dan tak bisa diselamatkan, ya harus dipangkas dan tumbuhkan tunas baru. Kuncinya sabar dan telaten,” tuturnya.

Selain menghadapi kendala teknis, Aat juga sering menerima curhat dari para pembeli yang mengeluh tanamannya tak kunjung berbuah. Setelah ia telusuri, banyak diantara mereka yang tidak memahami teknik pemangkasan dan pembentukan cabang.

“Anggur harus dibuat percabangannya secara bertahap dari mulai primer, sekunder, dan tersier. Kalau dibiarkan tumbuh liar, ya tidak akan berbuah. Setelah saya ajarkan, banyak yang akhirnya berhasil panen,” ujarnya bangga.

Wisata Anggur

Awalnya, Aat tak berniat menjual hasil kebunnya. Namun ketika ia mengunggah foto-foto buah anggur ke media sosial, antusiasme masyarakat justru membeludak. Banyak yang datang ingin memetik langsung, bahkan menanyakan cara menanam dan membeli bibit. “Dari sana saya mulai berpikir untuk membuka kebun sebagai wisata petik buah dan pusat edukasi. Ternyata peminatnya luar biasa,” ujarnya bangga.

Kini, Kebun Anggur Ponjay tak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pembibitan dan edukasi anggur. Bahkan kebun anggur milik Aat menjadi salah satu contoh sukses budidaya anggur di daerah perkotaan. Setiap akhir pekan, kebun ini ramai dikunjungi warga yang ingin menikmati sensasi memetik buah langsung dari pohonnya.





Aat menjual anggur antara Rp100 ribu hingga 250 ribu/kg, tergantung jenis dan kualitasnya. Harga tersebut sepadan dengan pengalaman dan kesegaran buah yang didapat pengunjung. “Sensasi petik sendiri itu tak bisa dibandingkan dengan beli di toko. Orang senang bisa menikmati hasil langsung dari pohonnya,” katanya.

Bagi yang ingin mencoba menanam anggur di rumah, Aat menjual bibit siap tanam seharga Rp125 ribu per pohon. Setiap bibit dijamin berkualitas dengan tinggi 70–100 sentimeter, daun aktif, dan perakaran kuat. Ada juga dalam tabulampot yang sudah berbuah dengan harga mulai Rp1,25 juta hingga 3,5 juta, tergantung jenis dan banyaknya dompolan.

Selain itu, ia memproduksi media tanam khusus anggur dalam kemasan 3 kg seharga Rp20 ribu per pack, serta pupuk AB Mix, rahasia kesuburan tanaman di kebunnya. “Dari fase vegetatif sampai generatif, saya hanya pakai pupuk AB Mix. Cukup disiram dua hari sekali, 1 mililiter untuk satu liter air. Hasilnya pertumbuhan cepat dan buahnya lebat,” ungkapnya.

Dalam sebulan, penjualan Kebun Anggur Ponjay tergolong stabil 100–200 bibit, 500–1.000 media tanam, dan sekitar 50 pack pupuk terjual setiap bulan. Usaha yang bermula dari iseng kini menjadi bisnis dengan perputaran ekonomi yang nyata.

Sebagai Ketua DPD ASPAI Tangerang Selatan, Aat berharap pemerintah semakin memberi perhatian kepada para penggiat anggur di tanah air. Ia menilai potensi budidaya anggur lokal sangat besar, mengingat tingginya angka impor buah anggur yang bisa ditekan melalui produksi dalam negeri.

“Pemerintah sudah mulai peduli lewat ASPAI. Harapan kami, tahun 2026 dukungan bisa lebih konkret, agar minimal 20 persen impor anggur bisa digantikan oleh hasil panen petani lokal,” ujar Aat optimistis. **Herman/Yul**

Musim Hujan, Antara Tantangan dan Peluang bagi Petani

Oleh : **Warsana, SP.M.Si.MP.**
Penyuluh Pertanian Ahli Utama BRMP Jawa Tengah

Setiap tahun, datangnya musim hujan menjadi pertanda dimulainya babak baru bagi kehidupan pertanian di Indonesia. Curah hujan yang meningkat, udara yang lembap, serta langit yang kerap berawan memang kerap menyulitkan aktivitas sehari-hari. Namun, bagi para petani, inilah masa yang menentukan: musim tanam dimulai, harapan baru untuk panen pun tumbuh.

Musim hujan di Indonesia biasanya berlangsung antara Oktober hingga Maret. Meskipun begitu, waktu kedatangannya bisa berbeda-beda di setiap daerah, tergantung kondisi iklim dan geografis. Ciri-cirinya mudah dikenali, hujan turun hampir setiap hari, udara menjadi lebih sejuk, sinar matahari berkurang, dan air di sungai serta tanah melimpah. Semua tanda itu menjadi sinyal alam bagi para petani untuk bersiap.

Namun, musim hujan tidak selalu bersahabat. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan genangan air, memicu penyakit tanaman, serta melarutkan unsur hara penting dari tanah. Karena itu, strategi yang matang menjadi kunci agar musim hujan tidak berubah menjadi musibah bagi hasil panen.

Langkah pertama adalah persiapan lahan. Sebelum hujan datang dengan intensitas tinggi, petani perlu memperbaiki saluran irigasi dan drainase agar air tidak menggenang. Di lahan sawah, pematang dan pintu air harus diperkuat. Sementara di lahan kering atau sayuran, bedengan perlu dibuat lebih tinggi agar akar tanaman tidak tergenang.

Kedua, pemilihan varietas unggul. Benih yang tahan genangan, tahan jamur, dan berumur pendek (genjah) lebih sesuai untuk musim hujan. Untuk padi, varietas seperti Inpari 32 atau Inpari 42 dikenal tangguh menghadapi kondisi lembap dan penyakit hawar daun. Pemilihan varietas bukan sekadar teknis, tapi juga strategi cerdas untuk menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim.

Ketiga, pengelolaan pemupukan. Hujan deras bisa "mencuci" unsur hara dari tanah, sehingga pemupukan sebaiknya dilakukan bertahap agar lebih efisien. Penyiangan gulma juga penting, karena gulma dapat menjadi sarang hama dan penyakit di musim lembap.

Keempat, pengendalian hama dan penyakit. Kelembapan tinggi sering menjadi surga bagi jamur dan bakteri penyebab penyakit tanaman. Petani perlu melakukan pengamatan dini dan menggunakan pestisida nabati atau hayati secara bijak. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah langkah berkelanjutan yang tidak hanya melindungi tanaman, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan.

Kelima, manajemen air dan lingkungan. Meski air berlimpah, pengaturannya tetap penting. Saluran pembuangan perlu dibuat agar air berlebih segera mengalir, dan di daerah miring perlu dibuat terasering untuk mencegah erosi. Tanaman penutup tanah juga bisa membantu menjaga kesuburan lahan.

Tidak kalah penting, peran kelompok tani dan penyuluh menjadi ujung tombak keberhasilan. Gotong royong memperbaiki saluran air, melakukan tanam serentak, hingga berbagi informasi tentang cuaca dan teknologi pertanian adaptif akan memperkuat ketahanan komunitas petani. Lalu, komoditas apa saja yang cocok ditanam di musim hujan?

Beberapa tanaman justru tumbuh subur di kondisi lembap. Untuk tanaman pangan, padi sawah adalah primadona, diikuti jagung varietas tahan lembap, serta ubi kayu dan ubi jalar yang cocok ditanam menjelang akhir musim hujan.

Pada tanaman palawija, kacang tanah dan kedelai bisa menjadi pilihan saat curah hujan mulai menurun. Sementara itu, sayuran daun seperti bayam, kangkung, sawi, dan selada, serta buah-buahan seperti pepaya, pisang, dan nanas, dapat tumbuh baik di musim basah. Untuk tanaman perkebunan, karet, kelapa sawit, dan kakao justru membutuhkan banyak air pada fase awal pertumbuhan.

Musim hujan memang datang membawa tantangan, tetapi di tangan petani yang siap, ia berubah menjadi peluang emas. Dengan perencanaan matang, varietas unggul, dan dukungan teknologi budidaya adaptif, musim hujan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Karena sejatinya, hujan bukan sekadar air yang jatuh dari langit, ia adalah harapan yang menumbuhkan kehidupan.

Kolom

Pertanian ke Depan Setelah Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran



Oleh: **Memed Gunawan**

Capaian penting dalam tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran pantas diapresiasi. Upaya perluasan lahan sawah, dukungan antar sektor untuk pertanian sangat menonjol dan produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Pemerintah menyatakan bahwa target swasembada pangan yang awalnya diberikan waktu 4 tahun, berhasil dicapai dalam satu tahun. Cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai 124,36 (September 2025). Pemerintah menyatakan telah mencabut sekitar 240 aturan penghambat dan menerbitkan 17 regulasi strategis dalam 10 bulan untuk sektor pangan dan pertanian. Program cetak sawah baru mulai dilaksanakan; salah satu data menyebut cetak sawah 225.000 ha hingga Oktober 2025.

Pertanian jadi prioritas nasional. Ini penting karena Ketahanan Pangan adalah fondasi stabilitas sosial ekonomi. Langkah memangkas distribusi pupuk sehingga pabrik pupuk langsung mengirim ke Gapoktan, Koperasi, dan pengecer adalah satu terobosan penting. Demikian juga pembekuan usaha pengecer yang nakal merupakan pelajaran yang menjerakan. Kado bagi petani yang terbaru adalah turunnya harga pupuk bersubsidi yang cukup signifikan, sehingga memberikan gairah bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Tantangan dan langkah ke depan memang masih terjal. Walaupun angka-angka besar sudah dicapai, detail implementasi di lapangan (misalnya distribusi, kualitas benih, infrastruktur irigasi, alih fungsi lahan dan peningkatan kualitas lahan) masih memerlukan perjalanan panjang.

Strategi dan program modernisasi pertanian Indonesia tetap disertai upaya menjaga kelestarian dan kualitas sumberdaya alam, mewujudkan pertanian efisien, produktif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir menjaga/meningkatkan kualitas tanah, air, dan biodiversitas, pemulihan kualitas tanah akibat degradasi, erosi dan penurunan kesuburan. Berjuta hektar lahan pertanian kehilangan banyak top soil dan bahan organik sehingga perlu mendapat perhatian untuk dikembalikan kesuburannya.

Prioritas harus diletakkan pada perlindungan fungsi ekosistem tanah, air, karbon, dan biodiversitas. Perlakukan produktivitas dan konservasi merupakan satu paket kebijakan dan menjadi tujuan terpadu. Pendekatan lanskap dan berbasis wilayah berupa kebijakan komoditas, monitoring berbasis satelit, jaringan uji tanah dan sistem informasi petani harus dilakukan.

Upaya khusus pada petani mencakup peningkatan pendapatan petani, akses ke input berkualitas, layanan pembiayaan dan pasar, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, mitigasi emisi, pengembangan pertanian organik/terintegrasi, dan pengurangan kehilangan pasca panen.

Pengelolaan tanah dan program rehabilitasi kesuburan, rekomendasi pemupukan berbasis analisis, subsidi awal untuk pupuk organik/kompos dan modernisasi sistem irigasi (perbaikan jaringan sekunder/tersier), implementasi mikro-irigasi/drip pada hortikultura, sampai sistem manajemen air berbasis digital.

Di atas itu semua peningkatan kualitas sumberdaya pertanian menjadi penentu keberhasilan program pembangunan dan modernisasi pertanian. Masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat, dan ini tidak lagi bisa ditunda, waktunya adalah sekarang dan harus berkelanjutan. Semoga keberhasilan terus berlanjut.

Sawit, Emas Hijau yang Penuh Duri

Bagi Indonesia, komoditas kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penyokong devisa negara yang sangat besar, bahkan ibarat emas hijau. Sayangnya, dalam tata kelola perkebunan sawit, ternyata banyak durinya.





Kondisi tersebut yang kemudian melatarbelakangi, Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI untuk mengungkap sisi lain pengelolaan sawit dari sisi pelayanan publik dalam buku: "Sawit, Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan"

"Buku ini bukan ingin menempatkan saya sebagai ahli sawit. Tapi karena posisi saya sebagai pengawas pelayanan publik agar tidak terjadi maladministrasi. Buku ini melalui proses panjang dari kajian sistemik dan membentuk tim khusus untuk mengelola kajian sistemik," kata Yeka saat peluncuran buku di Gedung Ombudsman di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut Yeka, buku ini sebetulnya ingin bicara posisi bawah posisi Indonesia dalam industri sawit sebenarnya telah menjadi pemimpin dunia. Namun Indonesia belum menjadi yang terbaik di dunia.

Setidaknya ada empat masalah besar yang perlu diperbaiki dalam industri sawit dalam negeri yakni legalitas, perijinan usaha perkebunan, tata niaga sawit dan kelembagaan. Menurut Yeka, aspek kelembagaan menjadi simpul yang paling menentukan. Selama ini tata kelola sawit tersebar diberbagai kementerian dan kelembagaan. Dari mulai Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ATR/BPN, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Keuangan dan Kemenko Perekonomian.

"Masing-masing mempunyai data dan regulasi sendiri yang kerap saling tumpeng tindih. Kondisi ini melahirkan maladministrasi struktural, kebijakan tidak sinkron dan implementasi di lapangan membingungkan pelaku usaha," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman, Muhammad Najih mengatakan, di balik kontribusi besarnya sawit tersebut, tata kelola industri sawit masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari aspek tumpang tindih, perizinan, konflik lahan, lemahnya kemitraan antar perusahaan dan petani hingga isu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan itu sendiri.

Potensi Maladministrasi

Dari kajian sistemik Ombudsmen telah menemukan potensi maladministrasi masih sangat tinggi dalam layanan publik di sektor sawit ini. Pertama, aspek lahan. Kajian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tumpang tindih antara izin perkebunan sawit dan kawasan hutan seluas kurang lebih 3,22 juta ha dan melibatkan kurang lebih 3.200 subjek hukum.

Dari jumlah itu baru sekitar 6% yang terselesaikan secara hukum. Ketidakpastian ini berakibat pada penundaan layanan hak atas tanah dan potensi kerugian mencapai kurang lebih Rp76,8 triliun per tahun akibat penyusutan produktivitas lahan.

Kedua, aspek perizinan. Data menunjukkan bahwa baru 1,54% dari 2,3 juta perkebun sawit rakyat yang memiliki STDB dan hanya 0,86% lahan sawit rakyat yang telah tersertifikasi ISPO. Lemahnya SDM di daerah, tumpang tindih lahan, serta sistem sertifikasi yang belum efektif menjadi faktor utama.

"Potensi kerugian akibatnya rendahnya produktivitas dan penggunaan bibit nonstandar juga menimbulkan kerugian tersendiri. Diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun per tahun," katanya.

Ketiga, lanjut Najih, aspek tata niaga. Masih terdapat dualisme izin pabrik kelapa sawit antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Keadaan ini menimbulkan perbedaan harga TBS, persaingan tidak sehat, serta ketidakpastian rantai pasok dari pabrik kelapa sawit itu sendiri.

Selain itu, pungutan ekspor CPO dan POE yang tidak seimbang membuka cela manipulasi laporan ekspor dengan potensi kerugian mencapai kurang lebih Rp 11,5 triliun per tahun.

Keempat, aspek kelembagaan. Tata kelola industri sawit diampu banyak kementerian dan lembaga, namun belum terintegrasi secara kelembagaan dan regulatif. Potensi mal administrasi yang ditemukan antara lain pengabaian kewajiban hukum dan tidak diberikannya layanan publik secara optimal.

Total potensi kerugian ekonomi akibat mal administrasi di sektor sawit diperkirakan mencapai Rp 279,1 triliun per tahun. "Temuan-temuan itu menunjukkan, melalui buku ini Ombudsmen berupaya menghadirkan gambaran yang komprehensif tentang akar masalah dan solusi perbaikan sistemik di sektor kelapa sawit," katanya. **Yul**

Rekomendasikan **Badan Sawit Nasional**

Dari hasil kajian Ombudsman merekomendasikan pembentukan Badan Sawit Nasional. Lembaga ini nantinya dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Presiden langsung. "Melihat tantangan yang menggunung Badan Sawit Nasional menjadi jawaban yang tidak bisa lagi dan menjadi otoritas tunggal," kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.

Dengan adanya Badan Sawit Nasional, Yeka berharap Presiden nantinya dapat mengintegrasikan peran dari 15 Kementerian/Lembaga dan 23 pemerintah provinsi dan ratusan kabupaten kota. "Paling penting badan ini tidak hanya menyatukan kebijakan, tetapi juga meningkatkan peran strategis Satgas Penyelenggarakan Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappanas, Prof. Rachmat Pambudy mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut usulan adanya Badan Sawit Nasional. Apalagi badan ini nanti diharapkan bisa mengatasi persoalan mendasar persawitan di Indonesia.

"Bappenas harus merencanakan. Nah, basis perencanaan macam-macam. Ada basis dari daerah, ada basis hasil kajian seperti Ombudsman ini yang mengamanatkan berdirinya Badan Sawit Nasional," katanya.

Menurut Rachmat, Badan Sawit Nasional ini akan mengelola satu data sawit. Sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia memang harus mempunyai data tunggal sawit nasional. Dengan data tunggal yang dikelola Badan Sawit Nasional nantinya tidak ada lagi masalah tumpang tindih lahan dan konflik di perkebunan sawit.

"Dengan ada data tunggal sawit nasional, konflik ini bisa diredakan. Dengan ada data tunggal sawit nasional, dispute kita dengan Uni Eropa dan negara-negara lain bisa diselesaikan," tuturnya. **Yul**

Inpara Jawara di Lahan Rawa

Lahan rawa ibarat raksasa yang tengah tertidur. Dengan potensi lahan yang cukup luas, lahan rawa bisa menjadi penyokong produksi pangan nasional. Karena itu, pemerintah saat ini mendorong budidaya padi di lahan rawa.



Mendukung pengembangan padi di lahan rawa, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 telah melepas benih Inbrida Padi Rawa atau lebih dikenal dengan nama Padi Inpara. Padi ini toleran terhadap kondisi lahan rawa, baik cekaman biotik yakni hama dan penyakit. Bahkan terhadap cekaman abiotik lingkungan seperti genangan, kemasaman tanah, keracunan Fe dan Al, dan lain-lain.

Dibandingkan varietas lokal yang produktivitasnya hanya sekitar 2-4 ton/ha, potensi produksi Inpara jauh lebih sekitar 4-7 ton/ha gabah kering giling (GKG). Selain itu, Inpara berumur genjah atau hanya sekitar 110-140 hari, sehingga dalam satu tahun petani bisa tanam 2-3 kali. Bandingkan dengan varietas lokal Siam Unus umurnya sekitar 7-9 bulan, sehingga dalam satu tahun hanya bisa tanam satu kali saja.

Dari sisi rasanya, padi Inpara juga lebih pulen, sehingga banyak disukai masyarakat Jawa dan Sulawesi. Namun ada pula yang pera (banyak disukai masyarakat suku banjar di Kalsel dan minang di Sumbar).

Lahan Seksi

Saat ini lahan rawa bisa dikatakan sebagai lahan seksi karena dalam beberapa tahun terakhir pembangunan pertanian secara masif dilakukan di lahan rawa, baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sebut saja program Optimalisasi Lahan (Oplah) tahun 2024 seluas 350 ribu ha dan tahun 2025 seluas 500 ribu ha, sehingga pada akhir 2025 diharapkan bisa mencapai 850 ribu ha.

Pemerintah juga menggerakkan Brigade Pangan (BP) yang mengusung pertanian moderen dan regenerasi ke petani milenial di lokasi Oplah lahan rawa. Selanjutnya ada pula program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dengan target 3 juta ha hingga 2029 juga diarahkan juga ke lahan rawa terutama di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

Potensi pengembangan pertanian lahan rawa sangat tinggi karena lahan ini sangat luas dan memiliki sumberdaya air yang berlimpah. Ada sekitar 10 juta ha lahan rawa siap dibuka untuk pertanian utamanya lahan sawah.

Namun demikian, lahan rawa umumnya termasuk lahan marginal dan kurang subur, sehingga pemanfaatannya untuk pertanian menghadapi berbagai kendala fisik. Misalnya, masalah genangan air yang tinggi dan sulit dikendalikan terutama di saat musim hujan.

Lalu ada masalah kemasaman tinggi akibat oksidasi pirit (FeS2) menghasilkan asam sulfat sehingga pH tanah drop ke sekitar pH 3.0. Selanjutnya ada pula masalah unsur dan senyawa beracun, seperti Fe, Al, asam-asam organik, dan lain-lain. Semua masalah tersebut menjadi pembatas bagi pertumbuhan tanaman.

Petani rawa umumnya masih menanam padi varietas lokal seperti di Kalsel dan Kalteng, mereka menanam Siam Unus karena pemeliharaannya mudah, tidak perlu input tinggi, dan disukai pasar. Namun produktivitas padi lokal relatif rendah, hanya sekitar 2 ton/ha. Karena umurnya sekitar 8 bulan, sehingga petani hanya bisa tanam sekali saja dalam setahun.

Sementara itu, varietas favorit petani seperti Ciherang, Mekongga, dan Inpari meskipun produktivitasnya tinggi di sawah irigasi, tapi hasilnya relatif rendah bila ditanam di lahan rawa. Varietas favorit tersebut nampaknya tidak toleran terhadap berbagai cekaman biotik dan abiotik rawa.

Adopsi Inpara

Hadirnya varietas padi Inpara menjadi pilihan bagi petani yang selama ini tinggal di wilayah lahan rawa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, petani rawa mulai beralih ke Inpara karena yakin varietas ini produktivitasnya tinggi dan umurnya genjah, sehingga dalam satu tahun bisa menanam dua kali.

Contohnya Basran, anggota Kelompok Tani Cinta Maju di rawa lebak di Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sejak menanam padi Inpara, mampu menghasilkan sekitar 7 ton/ha GKP atau sekitar 6,3 ton/ha GKG. Hitungannya, jika HPP GKP Rp 6.500/kg dan menanam padi 2 kali setahun di lahan seluas 2 ha, Basran bisa mendapatkan sekitar Rp 182 juta/tahun. Itu hanya dari usaha tani padi saja.

Demikian pula Darsono, anggota Kelompok Tani Sido Muncul di rawa pasang surut, di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala mampu menghasilkan padi Inpara sekitar 5 ton/ha GKP atau sekitar 4,5 ton/ha GKG. Pendapatannya kini mencapai Rp 130 juta/tahun. Hasil tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan petani yang menanam varietas lokal atau varietas lainnya.

Ir Yantirina MS, peneliti pertanian rawa BRIN mengatakan, petani rawa kini sudah banyak mengadopsi Inpara. Diantara varietas Inpara yang sudah *release*, ternyata Inpara 2 dan Inpara 3 paling banyak ditanam di lahan rawa pasang surut di Kalimantan Selatan. “Kedua varietas Inpara ini dikenal sebagai varietas yang paling toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik di rawa,” katanya.

Keunggulan varietas Inpara 2 yakni berumur 128 hari, rasa nasi pulen, potensi hasil 6,08 ton/ha GKG, agak tahan terhadap wereng biotipe 2 dan tahan pula terhadap hawar daun dan blas, serta toleran terhadap keracunan Fe dan Al. Sedangkan Inpara 3 umurnya 127 hari, tekstur nasi pera, potensi hasil 5,6 ton/ha GKG, agak tahan terhadap wereng batang biotipe 3 dan tahan pula terhadap blas, serta agak tahan terhadap genangan.

Yantirina mengungkapkan, petani di lahan rawa pasang surut biasanya memadukan budidaya padi (*lowland*) dengan jeruk (*upland*) dalam sistem surjan. Dari jeruk, petani bisa mendapatkan sekitar Rp 50 juta/ha/tahun.

Cara ini ternyata memberi keuntungan yang maksimal bagi petani. Dari lahan budidaya padi Inpara, petani mendapatkan sekitar Rp 182 juta/tahun. Sementara dari budidaya jeruk sekitar Rp 100 juta/tahun. Dengan demikian, setahun petani bisa mendapatkan sekitar Rp 282 juta.

Terbukti, Inpara signifikan dalam mendongkrak hasil padi dan pendapatan petani. Inpara memang jawara di lahan rawa

(**D. Nursyamsi, A. Susilawati, dan I. Sariati**).

Trik Merebus Daging agar **Cepat Empuk**



Banyak kalangan ibu rumah tangga yang kerap kesulitan saat memasak daging agar cepat empuk. Kadang terpaksa memasak dalam waktu yang cukup lama. Ternyata ada cara mudah membuat daging cepat empuk.

Dosen Fakultas Peternakan IPB University, Dr Tuti Suryati mengungkapkan beberapa teknik agar saat merebus daging cepat emput. Pertama, menggunakan sendok dan garpu logam. Banyak orang menganggapnya sekadar mitos dapur, namun ternyata ada penjelasan ilmiah di balik kebiasaan ini.

Menurut, hal ini ternyata benar adanya. Penggunaan sendok atau garpu logam dalam rebusan daging dapat mempercepat proses empuknya daging. Hal ini berkaitan dengan kemampuan logam sebagai konduktor panas.

"Keberadaan sendok dalam air rebusan dapat meningkatkan dan mempertahankan panas air dan udara dalam panci lebih cepat dan stabil. Panas tersebut kemudian ditransfer ke jaringan daging, sehingga daging menjadi lebih cepat empuk dibandingkan tanpa menggunakan sendok atau garpu logam," tuturnya.

Selain metode ini, Dr Tuti juga membagikan cara lain mempercepat empuknya daging tanpa menggunakan panci presto. Salah satunya adalah teknik rebus 5-30-7. Teknik ini terdiri dari merebus daging selama 5 menit dalam air mendidih dengan api sedang-besar dan panci tertutup.

Langkah selanjutnya, mematikan api dan mendiamkannya selama 30 menit. Setelah itu, api dinyalakan kembali dan daging direbus lagi selama 7 menit. "Metode ini menjaga panas tetap terperangkap dalam daging secara konstan dan tidak berlebihan," katanya.

Hal ini menurutnya, memungkinkan proses degradasi otot tetap terjadi tanpa menghasilkan pengerutan protein daging berlebihan. Dengan demikian, mengurangi resiko pengerutan daging yang mengakibatkan daging menjadi lebih kering dan lebih keras atau alot.

Dr Tuti juga menyarankan penggunaan bahan alami pengempuk daging seperti daun pepaya, nanas, kiwi, atau jahe. Bahan-bahan tersebut mengandung enzim seperti papain (daun pepaya), bromelin (nanas), dan zingibain (jahe) yang mampu mendegradasi protein daging.

Namun, Tuti mengatakan, efektivitasnya bergantung pada cara penggunaan dan jumlah bahan yang digunakan. "Contohnya, penggunaan parutan atau jus nanas cukup dilumuri pada daging selama 10-15 menit saja sebelum direbus agar tidak membuat tekstur daging hancur," ungkapnya.

Selain itu, penggunaan bubuk ekstrak enzim papain yang tersedia di pasaran juga menjadi cara praktis. Caranya, cukup lumuri daging dengan satu sendok makan bubuk papain untuk 1 kg daging, lalau diamkan selama 20-30 menit, kemudian cuci dan rebus.

"Kombinasi antara teknik rebus 5-30-7 dengan penggunaan bahan pengempuk alami maupun bubuk enzim juga disebut efektif mempercepat proses empuknya daging," ujarnya seperti dikutip dari laman *IPB University*.

Namun Tuti menambahkan, lama waktu perebusan daging sangat tergantung pada jenis, bagian, dan ukuran potongan daging. Daging bagian punggung seperti loin dan tenderloin lebih cepat empuk dibanding bagian paha atau sengkel yang memiliki lebih banyak jaringan ikat.

Terkait dengan praktik merebus dan membuang air rebusan pertama, Dr Tuti mengingatkan bahwa tindakan tersebut bisa mengurangi kandungan nutrisi daging, karena lemak dan protein mudah larut dapat ikut terbuang bersama air rebusan. Selamat mencoba. **Yul**

Talenan Kayu Berubah Warna jadi Hitam, **Amankah?**

Talenan kayu yang berubah warna menjadi hitam sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi para ibu. Lantas, apakah talenan semacam itu masih aman digunakan untuk mengolah makanan?

Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, Harum Fadhilatunnur, STP, MSc menjelaskan, perubahan warna hitam pada talenan, baik yang terbuat dari kayu maupun plastik, kemungkinan disebabkan pertumbuhan mikroba seperti kapang atau bakteri yang bercampur dengan sisa makanan yang tertinggal.

"Talenan kayu memiliki pori-pori yang dapat menyerap air dan sisa makanan, menciptakan lingkungan lembap yang ideal bagi pertumbuhan mikroba," ujarnya seperti dikutip dari laman *IPB University*.

Hal serupa juga terjadi pada talenan plastik. Menurut Harum, goresan-goresan akibat pemakaian dapat memerangkap sisa makanan dan menjadi tempat tumbuh mikroba. Beberapa jenis kapang dapat menghasilkan pigmen ataupun spora berwarna hitam, yang menyebabkan perubahan warna pada talenan.

Ia menambahkan, mikroba yang tumbuh di dalam talenan dapat berupa mikroba patogen atau mikroba pembusuk. Jenis mikroba tersebut sulit diidentifikasi tanpa analisis laboratorium, namun risikonya tidak bisa diabaikan.

Jika mikroba patogen, misalnya *Salmonella, E. coli,* atau *Listeria monocytogenes,* tumbuh di talenan dan mencemari makanan, maka berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Dari mulai yang sifatnya jangka pendek seperti diare maupun jangka panjang akibat akumulasi mikotoksin.

Karena itu, ia menyarankan agar selalu menjaga talenan tetap bersih dan kering. Setelah digunakan, talenan sebaiknya langsung dicuci dengan air sabun dan air panas, lalu dikeringkan. Proses sanitasi dengan disinfektan seperti klorin juga dapat dilakukan secara berkala.

Selain itu, lanjutnya, penggunaan talenan perlu dibedakan antara talenan khusus bahan mentah seperti daging dan ikan, dan talenan khusus bahan matang atau siap saji seperti buah dan sayur, untuk mencegah kontaminasi silang. "Kita bisa gunakan bentuk atau warna talenan yang berbeda untuk masing-masing talenan agar mudah mengingatnya," ujarnya.

Terkait usia pakai talenan, Harum menyatakan tidak ada patokan khusus. Namun, jika permukaan talenan sudah rusak dan sulit dibersihkan, sebaiknya segera diganti. Sebaiknya, menggunakan talenan dari bahan yang tidak menyerap air, seperti *stainless steel*.



"Bila tetap menggunakan talenan kayu atau plastik, proses pembersihan harus diperhatikan dengan lebih teliti untuk mencegah talenan menjadi tempat bertumbuhnya mikroba," katanya mengingatkan. **Yul**

BPPSDMP dan Timor Leste

Pacu Revolusi Pertanian Regional



Pemerintah Indonesia dan Timor Leste berkolaborasi mendorong revolusi pertanian di kawasan Asia Tenggara Timur. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan produksi, tapi juga penguatan kapasitas SDM, inovasi teknologi, dan ketahanan pangan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model regional yang bisa diterapkan di negara-negara lain untuk menghadapi tantangan pertanian.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kerjasama Politeknik Enjineering Pertanian (PEPI), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan Pemerintah Timor Leste. Momentum ini diwujudkan dalam pertemuan yang digelar di Tangerang, Rabu (15/10), dengan hadirnya sejumlah tokoh penting dari kedua negara.

Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Mariano Sabino Lopes, Duta Besar RI untuk Timor Leste Okto Dorinus Manik, serta Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Soares, turut hadir mendampingi delegasi resmi negaranya.

Dari pihak Indonesia, Direktur PEPI Harmanto beserta jajaran pimpinan termasuk Wakil Direktur I Andy Saryoko hadir langsung untuk menegaskan komitmen institusi vokasi pertanian ini. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat pendidikan vokasi pertanian, riset terapan, dan inovasi teknologi pertanian di kawasan regional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mencetak dampak nyata di lapangan. Kolaborasi Indonesia-Timor Leste harus mendorong peningkatan kompetensi SDM pertanian, riset kolaboratif, dan penerapan teknologi modern yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan tantangan global. "Kerja sama ini harus lebih dari sekadar pertukaran simbolis. Tujuannya adalah menciptakan inovasi yang langsung dirasakan manfaatnya di lapangan," kata Amran.

Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti menekankan kerja sama ini adalah bagian konkret dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. "Kolaborasi ini fokus pada peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian, yang menjadi fondasi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Ini bukan sekadar seremonial, tapi langkah nyata mendorong revolusi pertanian regional," ujarnya.

Direktur PEPI, Harmanto menambahkan, program kerja sama ini mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, pelatihan teknis, penelitian bersama, serta pengembangan teknologi pertanian presisi. "Sinergi ini bertujuan membangun jejaring akademik dan riset internasional. Kami ingin mencetak SDM pertanian yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan," katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur I PEPI, Andy Saryoko berharap kolaborasi ini akan memperluas kapasitas keilmuan di bidang pertanian. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan riset kolaboratif dan berbagi teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. "Kerja sama ini juga menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara tenaga ahli, mahasiswa, dan dosen dari kedua negara," ujarnya.

Selain itu, langkah strategis ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pionir dalam pendidikan vokasi pertanian dan pengembangan teknologi pertanian terapan. PEPI bersama BPPSDMP berkomitmen mencetak SDM yang mampu berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung Timor Leste dalam memperkuat kapasitas pertaniannya.

Kesepakatan kerja sama ini juga membuka peluang bagi kedua negara untuk memperkuat jejaring akademik dan riset internasional. Dengan berbagai program pertukaran, pelatihan, dan penelitian kolaboratif, Indonesia dan Timor Leste optimis mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. **Humas BPPSDMP**

TANI SUKSES

Iqbal Aprio Wandi, Ubah Sawah Jadi Laboratorium Inovasi



Di tangan Iqbal Aprio Wandi, sawah bukan lagi sekadar ladang padi. Pemuda asal Indramayu ini mengubah lahan warisan keluarga menjadi laboratorium inovasi pertanian yang penuh teknologi dan peluang.

Bagi sebagian orang, sawah hanyalah bentangan hijau tempat padi tumbuh. Namun bagi Iqbal Aprio Wandi, pemuda 28 tahun asal Indramayu, sawah adalah ruang eksperimen, tempat ide dan teknologi bertemu dengan lumpur dan cuaca. Ia menyebutnya "laboratorium inovasi pertanian".

Lulusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran ini awalnya tak pernah membayangkan hidupnya akan kembali ke sawah. Tahun 2020, ketika pandemi membuat banyak perusahaan berhenti merekrut, ia pulang kampung dan membantu keluarganya menanam padi. "Waktu itu niatnya cuma sementara, sambil nunggu panggilan kerja. Eh malah keterusan," kenangnya sambil tersenyum.

Namun dari keputusan sederhana itu, lahir pandangan baru: pertanian bukan sekadar tradisi, tapi arena bagi anak muda untuk berinovasi dan berdaya. "Kalau dikelola dengan cara modern, pertanian itu bukan pekerjaan kelas dua. Ini bisnis masa depan," katanya mantap.

Ketika banyak petani di sekitarnya masih setia dengan cara manual, Iqbal memilih jalur berbeda. Ia membawa masuk mesin dan teknologi dengan traktor roda empat, drone penyemprot pestisida, dan combine harvester untuk panen. Semua dicoba langsung di lahan yang ia kelola.

"Awalnya banyak yang nyinyir, bilang ini gaya-gayaan. Tapi setelah lihat hasilnya efisien dan panennya bagus, mereka mulai ikut," ujarnya. Dari situ, ia belajar satu ha, dimana perubahan dalam pertanian tak lahir dari seminar atau teori, tapi dari contoh nyata di lapangan.

Di tangan Iqbal, setiap musim tanam menjadi siklus riset kecil. Ia mencoba berbagai pola tanam, menyesuaikan waktu semai dengan kondisi iklim, dan mengatur rotasi agar hasil panen tidak menumpuk di satu waktu. Dengan begitu, harga jual bisa lebih stabil.

"Selama ini petani rugi karena panen bareng. Saya coba atur supaya tanamnya beda waktu, hasilnya harga gabah lebih tinggi," tuturnya. Kini harga gabah di wilayahnya bahkan mencapai Rp7.000 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah.

Baginya, sawah bukan lagi tempat mengulang rutinitas, melainkan tempat menguji cara baru. Ia mencatat hasil, membandingkan efisiensi tenaga, dan memantau data panen untuk setiap metode yang diterapkan. "Saya perlakukan sawah ini seperti laboratorium. Gagal ya dicatat, berhasil ya dikembangkan," tuturnya.

Kesadaran itu mendorongnya bergabung dengan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), wadah yang mendukung petani muda melalui pelatihan, bantuan alat, hingga pendampingan bisnis. Di sana, Iqbal menemukan banyak anak muda lain yang punya semangat serupa: ingin menjadikan pertanian sebagai sektor modern yang efisien dan berdaya saing.

"Lewat KEP, kami belajar bukan cuma cara tanam, tapi juga manajemen, pemasaran, bahkan digitalisasi. Jadi petani itu sekarang harus ngerti bisnis juga," jelasnya.

Usaha itu berbuah pengakuan. Kelembagaan yang ia pimpin dinobatkan sebagai KEP Berprestasi Nasional kategori Pertanian Modern oleh Kementerian Pertanian. "Itu tanda bahwa inovasi di desa pun bisa dilihat dan dihargai," ujarnya.

Selain di sektor hulu, Iqbal mulai menjajaki hilirisasi dengan mengolah hasil panen menjadi produk turunan. Ia bereksperimen membuat beras kemasan dan konten digital tentang pertanian modern untuk menarik minat anak muda. "Petani sekarang harus melek kamera juga. Dari sawah kita bisa jualan online," katanya.

Iqbal menyadari tantangan terbesarnya bukan pada tanah atau cuaca, tapi pada cara berpikir masyarakat. Masih banyak yang memandang bertani sebagai pilihan terakhir. Ia sendiri tumbuh dengan nasihat khas orang tua: "Kalau nggak rajin belajar, nanti kerja di sawah."

"Padahal tanpa petani, semua orang nggak bisa makan. Profesi ini mulia, cuma citranya aja yang belum naik," ujarnya pelan. **Nattasya**



TABLOID Sinar Tani
PERTANIAN INDONESIA BARU

SINTA TV

PRICE LIST BERLANGGANAN



SINAR TANI CETAK

RP. 16.000
Per Edisi
Minimum Pembelian

Rp 64.000/BLN
Rp 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER

Rp. 72.000/ Thn

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Nomor Whatsapp : .....
Email : .....
Jabatan : .....

No rek : 127.0096.016.587
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

CONTACT

081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SINTA TV

Pemerintah Bentuk Satgas Pengendali Harga Beras



Pemerintah membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. Pembentukan tersebut melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras.

Belum sebulan, sejak dilantik menjadi Kepala Bapanas pada 9 Oktober lalu, , Andi Amran Sulaiman langsung mengambil kebijakan membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras. Satgas tersebut memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan mutu beras, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan mutu beras.

Struktur keanggotaan Satgas Pengendalian Harga Beras terdiri dari berbagai unsur Kementerian dan Lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan POLRI, Perum BULOG.

Anggota Satgas juga berasal dari pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan. Pelaksanaan Satgas di daerah dikoordinasikan Satgas Pangan POLRI, dengan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, untuk menjaga agar harga beras nasional tetap sesuai ketentuan HET sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 299 Tahun 2025. Satgas Pengendalian Harga Beras menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan distribusi beras.

Langkah operasional dilakukan secara terstruktur dan transparan. Pertama, identifikasi usaha dan pemeriksaan harga di tingkat produsen, distributor, grosir, dan ritel modern. Kedua, pemberian tanda patuh bagi pedagang yang menjual sesuai HET. Ketiga, pemberian surat teguran tertulis bagi yang menjual di atas HET, dengan waktu penyesuaian maksimal 1 minggu. Keempat, rekomendasi pencabutan izin usaha jika teguran tidak diindahkan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap 38 provinsi di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada 59 kabupaten/kota yang sempat mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat ini Tim Satgas Pengendalian Harga Beras yang telah meninjau lapangan dilaporkan telah adanya penurunan harga beras di berbagai Kabupaten/ Kota maupun daerah.

Harga Beras Turun

Tinjauan dilakukan dengan melakukan pengawasan di 132 titik lokasi pada 90 kabupaten/kota di 20 provinsi. Hasil pantauan beras medium di 13 Propinsi menunjukkan 41 Kota Kabupaten dengan kategori harga beras masih di bawah HET. Sedangkan hasil pantauan beras premium di 13 Provinsi, sudah terdapat 36 Kota/Kabupaten dengan kategori harga beras masih di bawah HET.

Daerah-daerah dengan kenaikan harga tipis di atas HET kini menjadi prioritas intervensi dengan distribusi stok tambahan BULOG serta pengawasan intensif lintas sektor. Pada Minggu III Oktober 2025 sesuai hasil perhitungan IPH (Indeks Perkembangan Harga) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan, meskipun terdapat 62 kota kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras, namun juga diimbangi dengan penurunan harga beras di 197 Kota Kabupaten.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kota kabupaten yang mengalami penurunan harga beras lebih banyak dibandingkan kota kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras. Deputi Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan, pemerintah bersama Satgas Pengendali Harga Beras akan terus memantau harga beras di lapangan.

"Setiap pedagang yang kedapatan menjual beras di atas HET akan diberi peringatan dan waktu satu minggu untuk menyesuaikan harga. Jika tetap melanggar, sanksi tegas akan diberikan," ujarnya.

Selain menegakkan aturan harga, Ketut juga mendorong pelaku usaha memperluas distribusi beras medium agar lebih mudah dijangkau masyarakat. "Pasar beras medium saat ini terbuka lebar. Kami mengimbau pelaku usaha menyalurkan berasnya ke ritel modern, pasar tradisional, dan pengecer lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Satgas Pangan untuk mengarahkan stok SPHP ke titik-titik rawan disparitas harga. BULOG juga siap memperluas intervensi di wilayah 3TP agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau.

"SPHP bukan sekadar program penyaluran beras murah, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga pangan," tutup Rizal Ramdhani.

Sebagai bagian dari Satgas, Perum BULOG menjalankan peran strategis dalam intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). BULOG memastikan stok beras tersedia di titik-titik yang mengalami disparitas harga dan mendistribusikannya secara cepat dan merata.

Intervensi dilakukan di wilayah dengan harga di atas HET, terutama di enam provinsi utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. BULOG terus melakukan operasi pasar dan distribusi beras SPHP di daerah yang terpantau naik.

"Kami juga berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau sesuai HET," lanjut Rizal.

Penyaluran beras SPHP dilakukan sesuai zonasi HET yang ditetapkan Bapanas: Zona 1: Rp12.500/kg (Jawa, Bali, Lampung, Sumsel, NTB, Sulawesi), Zona 2: Rp13.100/kg (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Kalimantan, NTT) dan Zona 3: Rp13.500/kg (Maluku dan Papua).

Mokhamad Suyamto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG juga memastikan bahwa kualitas beras SPHP selalu dalam kondisi baik. Proses penyimpanan dilakukan dengan sistem rotasi stok dan reprocessing guna menjaga mutu. "Setiap butir beras SPHP yang sampai ke tangan masyarakat sudah melalui pengecekan kualitas secara rutin. Kami juga terus memperbaiki sistem logistik agar rantai pasok lebih efisien," katanya.

Kehadiran beras SPHP menurutnya, terbukti menjadi salah satu faktor kunci dalam menahan laju inflasi bahan pangan. Program ini berkontribusi nyata terhadap stabilisasi harga beras di pasar, terutama di tengah fluktuasi pasokan dan permintaan.

"Dengan harga jual di bawah atau setara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, SPHP menjadi instrumen efektif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat tanpa mengorbankan mutu," katanya. **Yul**

KWT Simpati, Motor Penggerak Perempuan Desa Cigedang

Semangat pemberdayaan perempuan terus tumbuh di Kabupaten Kuningan. Salah satunya melalui kiprah Kelompok Wanita Tani (KWT) Simpati Desa Cigedang, Kecamatan Luragung. Di bawah kepemimpinan Juju Juati, kelompok itu berhasil menghadirkan produk-produk olahan pangan yang tidak hanya diminati masyarakat lokal, tetapi juga sudah merambah pasar di luar daerah.

Berbagai produk unggulan telah dihasilkan, di antaranya Abon Patin "The Patin", Snack Ubi Ungu, Kremes Ubi, Kremez Bizah, hingga Sistik. Inovasi olahan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kreativitas kaum perempuan mampu mengangkat potensi lokal dan menjadikannya bernilai ekonomis.

Bahkan, produk KWT Simpati sudah berhasil menembus rak Swalayan BORMA Bandung, sebuah capaian yang patut dibanggakan. Tidak hanya memperkuat semangat usaha, mereka juga ikut serta dalam kegiatan bantuan sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar.

Ketua KWT Simpati, Juju Juati, menyampaikan rasa syukurnya atas perjalanan kelompok yang terus berkembang. Keberhasilan kelompoknya tidak lepas dari kerja keras anggota serta dukungan masyarakat dan pemerintah. "Kami ingin terus berkontribusi, baik melalui produk olahan yang membanggakan desa, maupun kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat luas," ungkapnya.

KWT Simpati hadir sebagai contoh nyata bagaimana perempuan desa bisa menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus penguat solidaritas sosial. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, para anggota tidak hanya menciptakan produk bernilai jual tinggi, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Juju memiliki banyak ide salah satunya Abon Patin ide yang didapat adalah membuat menu sehat untuk anak-anak di Posyandu. "Balita kadang susah makan. Nah saya terinspirasi memberikan varian makanan. Biasanya kan hanya sapi dan ayam, jadi saya buat dengan patin yang kaya protein dan pencegah stunting. Jadi kalau dimakan dengan nasi hangat juga enak," tuturnya.

Juju mengatakan, produksi abon patin sekali buat sebanyak 20 kg. Setiap 10 kg bisa mendapat 80 pcs dengan harga terjangkau Rp. 20 ribu



per pcs. Pemasarannya, selain offline, juga online. "Bahan baku saya buat dari ikan segar. Kami ambil langsung dari peternak ikan patin, saya beli segar dan proses," katanya.

Namun ia mengakui, kendala dalam penjualan adalah naik turun. "Macam-macam lah suka dukanya. Saya sudah jalan 3 tahun, Alhamdulillaah berjalan. Omzet untuk patin saya bisa peroleh Rp 3 juta," imbuhnya.

Juju berharap usahanya ini bisa menginspirasi kelompok lain di Kabupaten Kuningan. "Dengan semangat kebersamaan, kreativitas, dan kepedulian, perempuan mampu berperan penting dalam membangun daerah yang mandiri, maju, dan berdaya saing," ungkapnya.

Echa/Yul

Komersialisasi E-PAPER Sinartani

Sinartani Tabloid sinartani.com SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV

RI-Brasil Perkuat Kerjasama Pertanian

Indonesia dan Brasil memperkuat hubungan strategis untuk memperluas kolaborasi ekonomi, perdagangan, energi, riset, statistik, dan pengembangan sektor pertanian dari kedua negara bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia, Kamis (23/10)



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bahwa kerja sama antara Indonesia dan Brasil sudah terbangun lama dan kini memasuki fase yang lebih konkret. Menurutnya, kedua negara memiliki potensi besar untuk saling melengkapi. Indonesia unggul dalam komoditas tropis seperti kelapa sawit, kopi, kakao dan kelapa.

"Kami kan sudah tiga kali ketemu ke Menteri Pertanian Brasil. Kami dua kali kunjungan ke Brasil. Menteri Brasil tiga kali kunjung ke Indonesia. Yang kita bahas adalah bagaimana saling menguntungkan. Yang pertama, yang surplus di Indonesia CPO. Kopi, kakao, yang kita ekspor ke sana. Ada kelapa," kata Mentan Amran di Istana Presiden.

Sementara Brasil yang memiliki kekuatan di komoditi sapi, daging, dan gandum, yang diskemakan untuk dikembangkan melalui pola investasi. "Kemudian (dari) mereka, sapi, gandum, daging, dan yang terpenting, kami undang investasi di Indonesia untuk pengembangan sapi," ujar Amran.

Mentan Amran memandang kemitraan dengan Brasil adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebelum pertemuan tingkat tinggi hari ini, kedua negara telah menandatangani beberapa nota kesepahaman penting di sektor pertanian. Pada 30 Oktober 2023, Mentan Amran telah mengajak Brasil untuk berinvestasi dan melakukan transfer teknologi di sektor gula, dengan tujuan mempercepat target swasembada gula nasional. Upaya tersebut disambut positif oleh pemerintah Brasil yang dikenal memiliki sistem industri gula modern dan efisien.

Selanjutnya, 12 September 2024 Indonesia–Brasil melakukan kerja-sama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Investasi diperkirakan bernilai Rp 4,5 triliun.

Kerja sama Indonesia–Brasil kali ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi antar dua negara di belahan dunia berbeda, tetapi juga menjadi simbol solidaritas antara sesama kekuatan agraris global. Melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun sektor pertanian yang berdaulat, modern, dan berdaya saing di tingkat internasional.

Amran menegaskan, kerja sama Indonesia–Brasil kini memasuki babak baru yang lebih strategis di bidang pertanian. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian nasional ke pasar Brasil, antara lain kopi, kelapa sawit, kopi, kakao dan kelap.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sebelumnya, Indonesia dan Brasil memperkuat hubungan strategis untuk memperluas kolaborasi ekonomi, perdagangan, energi, riset, statistik, dan pengembangan sektor pertanian.

Selain itu, kerja sama turut mencakup pengembangan bahan baku bioenergi. Pemerintah Indonesia menggandeng Brasil dalam penanaman tebu dan ubi kayu guna mempercepat penerapan mandatori bioetanol E10 sebagai bagian dari upaya transisi energi hijau nasional. **Yul**

Harris Priyadi Dinobatkan sebagai Ketum Asohi

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) resmi menetapkan Harris Priyadi sebagai Ketua Umum periode 2025–2029 melalui Musyawarah Nasional (Munas) IX yang digelar di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Drh Gowinda Sibit dipercaya memimpin Badan Pengawas ASOHI (BPA) meng gantikan Gani Harijanto.



Munas yang mengusung tema *"Bersama ASOHI, Sinergi Kuat, Industri Meningkat"* ini menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi industri obat hewan yang sehat, mandiri, dan berdaya saing global. Acara dihadiri pengurus pusat, pengurus daerah dari 16 provinsi, perwakilan anggota, instansi pemerintah, asosiasi lintas sektor, hingga mitra strategis industri.

Harris menegaskan tekad untuk menjadikan ASOHI lebih inovatif, kuat, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan industri peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. "Insyaallah saya siap menjalankan amanah ini dengan profesional. Saya terbuka terhadap saran dan masukan demi kemajuan bersama," ujarnya saat sambutannya usai pemilihan.

Ia menambahkan, kepengurusan baru akan berfokus pada penguatan komunikasi internal, peningkatan kolaborasi dengan pemerintah dan mitra strategis, penguatan organisasi di tingkat daerah, serta mendorong keberlanjutan industri obat hewan melalui inovasi dan kearifan lokal.

Ketua Umum ASOHI dua periode sebelumnya, Drh Irawati Fari, menekankan pentingnya konsistensi dan relevansi dalam menghadapi tantangan global. Konsistensi adalah kunci keberlanjutan agar ASOHI terus menjadi organisasi yang solid secara internal sekaligus adaptif terhadap dinamika nasional maupun global.

Menurutnya, keberhasilan industri veteriner kini tidak hanya diukur dari seberapa besar produksi, melainkan dari kualitas, keamanan, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kesejahteraan hewan.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Drh Agung Suganda saat membuka acara menegaskan, ASOHI merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. "ASOHI berperan penting melindungi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis dan resistansi antimikroba (AMR). Kami berharap ASOHI dapat terus membantu menyediakan obat hewan yang berkualitas dan terjangkau," ujarnya.

Agung juga mendorong agar komunikasi antara pemerintah dan asosiasi semakin intensif. Bahkan mengingatkan, pentingnya forum rutin antara ASOHI dan Kementerian Pertanian agar koordinasi semakin solid dan isu-isu industri dapat ditangani secara cepat.

"Minimal sebulan sekali kita bertemu untuk bertukar informasi. ASOHI adalah jembatan antara pemerintah dan industri obat hewan agar sektor ini terus tumbuh dan berkembang," tambahnya.

Herman/Yul


TABLOID Sinartani
TABLOID SINARTANI.COM
SINTA TV
1 tahun
KABINET MERAH PUTIH
SEKTOR PERTANIAN
Sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan positif, produksi padi dan indikator kesejahteraan petani berada pada posisi terbaik sepanjang sejarah Indonesia
Produksi Beras nasional Januari–Oktober 2025 mencapai 31.338.197 ton.
Nilai Tukar Petani (NTP) Meningkat: NTP mencapai 124,36
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen naik menjadi Rp6.500/kg
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton (Juni 2025)
Deregulasi Pupuk: Pemerintah berhasil menghapus 145 aturan tidak efisien, mempercepat distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani